



[KONTROVERSI]

“kudeta”

PRABOWO



A. Pambudi



A. Pambudi

KONTROVERSI
"Kudeta"
Prabowo

**Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng-edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

A. Pambudi

KONTROVERSI
“Kudeta”
Prabowo



Media Pressindo
Yogyakarta, 2007

KONTROVERSI “Kudeta” Prabowo

oleh: A. Pambudi
© *all rights reserved*
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desain sampul: Udien
Tata letak: Yoga

Diterbitkan oleh:

MedPress (Anggota IKAPI)
Jl. Irian Jaya D-24, Perum Nogotirto II,
Yogyakarta 55292 Telp (0274) 7103084
Faks (0274) 620879

Pambudi, A.

Kontroversi “Kudeta” Prabowo; A. Pambudi-
Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, 104 hlm, 14 cm

ISBN 979-222-172-7

Cetakan Pertama, 2007
Cetakan Kedua, 2007
Cetakan Ketiga, 2007
Cetakan Empat, 2007
Cetakan Kelima, 2007

Distributor tunggal:

PT. Agromedia Pustaka

Bintaro Jaya Sektor IX Jl. Rajawali HD X No. 3
Tangerang 15226 Telp (021) 7451644, 74863334
Faks (021) 74863332

Daftar Isi

PROLOG _____ 7

KRONOLOGI DETIK-DETIK YANG MENENTUKAN _____ 9

BAB 1: CERITA DI BALIK LENGSER-NYA SOEHARTO _____ 30

BAB 2: "PERANG DINGIN" SOEHARTO-HABIBIE _____ 37

BAB 3: BENARKAH ADA KUDETA? _____ 53

BAB 4: WIRANTO MENJAWAB _____ 77

BAB 5: TRADISI KUDETA DAN KONFLIK INTERNAL AD _____ 86

REFERENSI _____ 102

Prolog

Masa transisi dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie diwarnai banyak gejolak dan kontroversi. *Pertama*, meletusnya aksi kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang dipicu oleh penembakan empat mahasiswa Trisakti oleh seseorang tak dikenal. Peristiwa itu sangat menentukan rangkaian peristiwa yang lain. Namun hingga kini tidak diketahui siapa yang menembak, dan yang lebih penting lagi, siapa aktor intelektual di balik penembakan tersebut.

Kedua, rumor kudeta yang dikatakan akan dilakukan oleh Pangkostrad Letjen Prabowo. Kerusuhan terjadi ketika Presiden Soeharto berada di luar negeri. Skenarionya, Letjen Prabowo akan muncul sebagai “penyelamat” dari kekacauan. Namun dalam perkembangannya, Presiden Soeharto mengundurkan diri secara mendadak, Habibie mengambil alih kepemimpinan nasional, dan kekuatan Prabowo cs dieliminasi dari jajaran ABRI.

Habibie telah mengeluarkan memoarnya, yang mengupas kontroversi belakangan. Tidak disinggung mengenai siapa yang berada di balik penembakan mahasiswa Trisakti. Betapapun demikian, buku Habibie menjadi pemicu bagi para pelaku sejarah lain, khususnya Wiranto dan Prabowo, untuk angkat bicara. Mereka saling balas memberi komentar, dan saling mengajukan fakta menurut versi mereka sendiri.

Kehadiran buku ini mencoba merangkai komentar, pendapat, serta cerita dari para pelaku sejarah, yang bersumber dari biografi, memoar, wawancara yang dimuat media massa, serta sejumlah pemberitaan media massa. Sifatnya memang subjektif, namun jika dikompilasikan akan tampak apabila ada kisah yang bertentangan. Kalau ada yang tidak konsisten, publik akan mengetahuinya. Jadi, diharapkan kelak akan tersusun cerita yang obyektif, komplet, dan berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Wiranto dan Habibie telah menuliskan buku tentang bagaimana peran mereka dalam peristiwa 1998. Prabowo pernah mengeluarkan “buku putih”-nya. Semua itu merupakan bahan kajian yang amat berharga bagi para sejarawan untuk menyusun sejarah yang sesungguhnya pada periode transisi Soeharto-Habibie. Mudah-mudahan bermanfaat.

Penulis

KRONOLOGI DETIK-DETIK YANG MENENTUKAN

(Versi Mantan Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang dikompilasikan dengan Versi Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen Purn. Kivlan Zen)¹

Selasa, 12 Mei 1998

Tragedi Trisakti meletus. Empat orang mahasiswa tewas akibat peluru tajam. Tragedi ini menjadi pemicu bagi rangkaian kerusuhan yang lebih besar, 13-15 Mei 1998.

Rabu hingga Jumat, 13-15 Mei 1998

Terjadi aksi-aksi kekerasan massa, perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga tindakan asusila di Jakarta, Solo, dan beberapa tempat lain. Kepada pers, Gubernur DKI Sutiyoso mengumumkan, kerusuhan itu menelan sedikitnya 500 korban jiwa, 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi dan angkutan umum

¹ Sumber utama kronologi ini adalah buku Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Menuju Demokrasi* (THC Mandiri, 2006) dan buku Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI AD* (Institute for Policy Studies, 2004)

66 unit hangus dibakar, 821 unit sepeda motor hangus dibakar, begitu pula 1.026 rumah penduduk yang terlalap api. Jumlah bank yang dirusak mencapai 64 bank, dengan 313 kantor cabang, 179 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Kerugian fisik bangunan mencapai Rp 2,5 triliun, belum termasuk isinya.²

Rabu, 13 Mei 1998

Malam hari, sekitar pukul 21.00, Letjen Fachrul Rozi menelepon Mayjen Kivlan Zen agar Kostrad tidak menggerakkan pasukan dan dijawab oleh Mayjen Kivlan Zen bahwa Kostrad tidak menggerakkan pasukan tetapi menyiapkannya untuk membantu Kodam Jaya. Karena Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Pangdam Jaya kekurangan pasukan dan meminta ke Kostrad, maka Kostrad menyiapkan pasukan tersebut. Namun, Mabes ABRI tidak memberi angkutan Hercules untuk membawa pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar. Karena keadaan mendesak, Kostrad akhirnya mencarter pesawat milik Mandala di Makassar dan pesawat milik Garuda di Surabaya untuk membawa pasukan dengan biaya sendiri.³

Pukul 23.00 Wapres B.J. Habibie menyampaikan pernyataan keprihatinan pemerintah yang amat mendalam dan seruan kepada masyarakat agar menahan diri. Pernyataan dan seruan ini dibacakan di Istana Wakil Presiden.⁴

Kamis, 14 Mei 1998

Sejumlah petinggi militer berangkat ke Malang untuk menyertai Pangab Jenderal Wiranto yang bertindak selaku Inspektur Upacara dalam rangka serah terima tanggung jawab PPRC (Pasukan

² B.J. Habibie membandingkannya dengan Peristiwa Malari yang hanya merusakkan 144 bangunan (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 7)

³ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 86

⁴ *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 7

Pemukul Reaksi Cepat) ABRI dari Divisi 1 Kostrad kepada Divisi 2 Kostrad, walaupun Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto telah menyarankan agar Pangab tidak usah berangkat ke Malang. Letjen Prabowo beberapa kali menelepon Jenderal Wiranto, tetapi keputusan Panglima ABRI tetap ke Malang. Semula, direncanakan Kasum ABRI Letjen Fachrul Rozi yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara, namun pada tanggal 7 Mei 1998 rencana diubah oleh Jenderal Wiranto, di mana dia selaku Panglima ABRI menjadi Inspektur Upacara menggantikan Kasum ABRI.⁵

Kembali dari Malang, sekitar pukul 14.00, Letjen Prabowo Subianto bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Muchdi PR, politisi Fahmi Idris, dan pengusaha Maher Algadri, menggunakan panser, dan Mayjen Kivlan Zen menggunakan Land Rover, melakukan penghalauan penjarahan di pertokoan Sabang dengan menggunakan 2 regu pasukan. Panser kemudian bergerak melalui Jalan Thamrin dan ditempatkan di depan Mabes ABRI Jalan Merdeka Barat.

Malam harinya, di Markas Kostrad, berkumpul Setiawan Djodi, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjoyanto, WS Rendra, Fahmi Idris, Maher Algadri, Hashim Djojohadikusumo, Amran Nasution, Din Syamsuddin, Fadli Zon, Amidhan, Iqbal Assegaf, Hajriyanto Thohari, Kolonel Adityawarman dan Mayjen Kivlan Zen. Kedatangan Setiawan Djodi dkk (Adnan Buyung, Bambang Widjoyanto, dan WS Rendra), selain menanyakan perkembangan situasi, juga meminta Letjen Prabowo Subianto untuk mengambil alih keamanan, seperti dilakukan Soeharto tahun 1965. Atas permintaan itu, Letjen Prabowo menjawab bahwa di masa 1965, penanggung jawab keamanan Letjen Ahmad Yani gugur sehingga perwira senior di ABRI dan Angkatan Darat pada waktu itu adalah

⁵ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 85

Panglima Kostrad. Namun kondisi 1998 berbeda, masih ada Panglima ABRI Jenderal Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo, Wakil KSAD Letjen Sugiono. Panglima Kostrad berada di level ke-4, karenanya tidak pada tempatnya melakukan pengambilalihan komando pengamanan. Hal itu bisa diinterpretasikan sebagai kudeta.⁶

Jumat, 15 Mei 1998

Dinihari, Presiden Soeharto mendarat di Halim Perdanakusumah, tiba dari lawatannya di Kairo untuk menghadiri Sidang G-15 yang berlangsung 13-14 Mei. Akibat meletusnya kerusuhan di tanah air, dia mempercepat kepulangannya.

Menjelang siang, Presiden menerima Wapres B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Presiden Soeharto meminta laporan perkembangan terakhir mengenai keadaan tanah air, dan menjelaskan pemberitaan mengenai keinginannya untuk mundur.

Sabtu, 16 Mei 1998

Pukul 09.00 Presiden Soeharto menerima delegasi guru besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Rektor UI Asman Budisantoso di Jalan Cendana. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa menjadi presiden bukanlah keinginannya, tetapi sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai mandataris MPR.

Pukul 11.00 Presiden menerima pimpinan DPR untuk mengadakan rapat konsultasi. Yang hadir adalah Harmoko (ketua), Ismail Hasan Metareum (wakil), Fatimah Ahmad (wakil), Syarwan Hamid (wakil), Abdul Gafur (wakil), dan Sekjen DPR RI Afif Maroef.

⁶ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 86-87. Di kemudian hari, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah mengarahkan dan menyimpulkan pertemuan di Markas Kostrad 14 Mei 1998 malam sebagai pertemuan yang merancang kekacauan di Jakarta. Padahal kerusuhan sudah terjadi sejak sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto menegaskan tiga hal. *Pertama*, mempersilakan kelanjutan jalannya reformasi. *Kedua*, memperbaiki kinerja pemerintahan dengan melakukan *reshuffle* kabinet. Dan *terakhir*, Presiden akan menggunakan wewenang untuk melindungi keamanan rakyat dengan Tap MPR No. 5/1998.

Menanggapi pemberitaan pers yang menyebutkan keinginan-nya untuk mundur, Presiden Soeharto menegaskan bahwa itu tidak benar. Namun, kata Presiden, "Kalau masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau tidak percaya ya sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata."

Malam harinya, Jenderal Subagyo, Letjen Prabowo, Mayjen Muchdi PR dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bertemu Presiden, menyampaikan berita pernyataan dukungan ABRI pada pernyataan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).⁷ Padahal salah satu butir pernyataan itu menyetujui pengunduran diri Soeharto. Dukungan Wiranto terhadap pernyataan *lengser* itu beredar melalui satu salinan dari Puspen ABRI kepada media massa.

Pada hari yang sama, Mayjen Kivlan Zen menyatakan ketegasannya untuk bertindak keras apabila situasi tidak terkendali. Mayjen Kivlan Zen menemui Prof. Malik Fadjar, utusan Amien Rais, yang datang ke ruangan Kaskostrad untuk menyampaikan saran Amien Rais agar Soeharto segera melakukan reformasi. Kaskostrad Mayjen Kivlan Zen mengatakan kalau ada *people power* mengepung Istana Negara, maka akan terjadi penangkapan atau terjadi pertumpahan darah seperti peristiwa Tiananmen di Beijing tahun 1989.⁸

⁷ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 88

⁸ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm 88; lihat juga James Luhulima, *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto* (Kompas, 2001) hlm. 187

Minggu, 17 Mei 1998

Dinihari, Pangab Jenderal Wiranto mengklarifikasi pernyataannya kepada Presiden Soeharto. Ia berusaha mendapatkan lagi kepercayaan Presiden.

Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Dia datang bersama dengan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Mentamben Kuntoro Mangkusubroto, Menhub Giri Suseno, Menperindag Muhammad Hasan, Gubernur BI Sjahril Sabirin, Kabulog Beddu Amang, Gubernur DKI Sutiyoso, dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin.

Rapat Menteri bidang Polkam juga digelar untuk menanggapi meluasnya gejolak aksi unjuk rasa. Di samping itu, pemerintah asing mulai memerintahkan evakuasi terhadap warganya yang masih berada di Indonesia, serta melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Perintah tersebut datang dari pemerintah Amerika Serikat, Jerman, Taiwan, China, Australia, dan Filipina.

Pada hari yang sama, Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Abdul Latief mengundurkan diri dari jabatannya—dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.⁹

Senin, 18 Mei 1998

Ketua DPR/MPR Harmoko membacakan keterangan pers yang intinya: “.... Pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.” Pernyataan ini disampaikan Harmoko yang didampingi Syarwan Hamid (FABRI), Abdul Gafur (FKP), Ismail Hasan Metareum (FPP) dan Fatimah Ahmad (FPDI).

⁹ Habibie mengomentari ini sebagai sebuah peristiwa yang langka selama pemerintahan Presiden Soeharto (lihat *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 14)

Pukul 19.50, sebagai reaksi atas keterangan pers pimpinan DPR/MPR, jajaran pimpinan ABRI melalui Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyampaikan pernyataan pers. Isinya antara lain: “..... memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum.”

Dalam penyampaian pernyataan pers itu, hadir antara lain para Kepala Staf ABRI (yaitu KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, KSAL Laksamana TNI Arief Kusharyadi, KSAU Marsekal TNI Satria Tubagus, dan Kapolri Jenderal Pol. Dibo Widodo). Hadir juga Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR.¹⁰

Pada hari yang sama, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 16/1998 yang memberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi kekacauan. Inpres ini diberikan kepada Pangab Jenderal Wiranto.¹¹

Selasa, 19 Mei 1998

Pimpinan DPR mengadakan Pertemuan Konsultasi dengan pimpinan fraksi sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada saat yang sama, Presiden Soeharto mengundang sejumlah tokoh dalam pertemuan yang disiarkan langsung melalui ja-

¹⁰ Menurut Kivlan Zen, pernyataan dari pimpinan MPR agar Soeharto mengundurkan diri karena merasa ada dukungan dari pimpinan ABRI —terkait dengan pernyataan ABRI yang mendukung pernyataan PBNU (lihat *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 88)

¹¹ *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm.88. Beberapa pihak menafsirkan Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1998, setelah Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 (lihat a.l. majalah *Tempo* 29 Oktober 2006, hlm. 22)

ringan televisi. Pertemuan berlangsung di ruang Jepara, Istana Merdeka, berlangsung antara pukul 09.00 hingga 11.32 dan dihadiri oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Najib, Nurcholish Madjid, Ketua MUI K.H. Ali Yafie, H. Abdul Malik Fajar, H. Sutrisno Muhtam, K.H. Cholil Baidlowi, K.H. Ma'ruf Amin, H. Ahmad Bagja, serta Pembantu Asisten Khusus Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.

Menanggapi semakin derasnya tuntutan untuk mundur, Presiden Soeharto dalam kesempatan itu mengatakan, "Sekarang, kalau tuntutan pengunduran diri saya itu saya penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden. Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul masalah baru. Nanti jangan-jangan Wakil Presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus dan itu menjadi preseden atau menjadi kejadian buruk dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam menjamin kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat."

Sekitar pukul 10.00 di Istana Wakil Presiden, beberapa staf Wakil Presiden juga menyaksikan pertemuan Presiden Soeharto dan para tokoh masyarakat di layar televisi. Sementara itu Wakil Presiden sedang menerima tamu didampingi Sekretaris Wapres, para asisten Wapres, Akbar Tandjung dan Abdul Latief. Tiba-tiba salah seorang asisten Wapres memberitahu B.J. Habibie tentang pertemuan di Istana Merdeka tersebut. Segera, Wapres bersama para tamu, asisten, serta Akbar Tandjung langsung melihat dan mendengarkan keterangan Presiden tersebut.¹²

¹² *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 27-28

Penjelasan Presiden Soeharto di depan pers disambut kecewaan oleh para pejabat dan staf Wapres, bahkan asisten Wapres Ahmad Watik Pratiknya mengatakan Pak Harto telah “mengkhianati” B.J. Habibie sekaligus mengabaikan berlakunya Pasal 8 UUD 1945, karena tidak memercayai Wakil Presiden, dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa Presiden sangsi apakah Wakil Presiden dapat melanjutkan tugas-tugasnya, apakah nanti tidak menjadi sasaran demonstrasi, apakah nanti juga harus mengundurkan diri.¹³

Sekitar pukul 16.00 Letjen Prabowo menemui Amien Rais di Hotel Regent, antara lain meminta agar Amien Rais membatalkan *people power* karena berbahaya.¹⁴ Mereka sepakat bahwa proses reformasi harus berjalan konstitusional. Artinya, jika Presiden mengundurkan diri, maka Wakil Presiden menggantikannya.¹⁵

Pukul 18.00 B.J. Habibie menerima telepon dari Ketua DPR/MPR Harmoko yang menyampaikan hasil pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lainnya, bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, secara arif dan bijaksana, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri. Wapres menanyakan apakah keputusan tersebut sudah dibicarakan kepada Presiden Soeharto, na-

¹³ *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 28

¹⁴ Waktu itu ada informasi bahwa setelah *people power* di Monas, massa akan langsung merebut Istana Merdeka. Berita yang berkembang ketika itu, gedung MPR dikuasai massa, Istana direbut, dan pemerintahan transisi dibentuk dengan Benny Moerdani sebagai Presiden. Amien Rais akan dijadikan martir, ditembak orang tidak dikenal. Mereka yang punya rencana ini menginginkan lahirnya situasi revolusioner seperti Revolusi Perancis 1789 atau Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia atau *People Power* di Istana Malacanang, Manila, Filipina (*Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 88-89)

¹⁵ Pertemuan Letjen Prabowo dan Amien Rais tidak disukai Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto melaporkan Letjen Prabowo Subianto bertemu Amien Rais untuk menjatuhkan Soeharto, sehingga Letjen Prabowo Subianto dianggap berkhianat dan dimusuhi oleh kalangan Cendana (*Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 89)

mun Harmoko mengaku belum melakukannya, karena pernyataan tersebut bersifat pribadi dan sulit untuk melakukan hubungan dengan Presiden.

Pukul 20.30 Dalam kapasitasnya sebagai Wapres sekaligus Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, B.J. Habibie menghadap Presiden Soeharto, untuk membahas berbagai keadaan yang telah berkembang.

Rabu, 20 Mei 1998

Pukul 02.00 dinihari, Amien Rais melalui televisi membatalkan rencana *people power* pada Hari Kebangkitan Nasional, setelah ia melihat persiapan aparat di sekeliling Monas.

Pukul 17.00 pada tanggal 21 Mei 1998 (*sic*),¹⁶ ADC Kolonel (AL) Djuhana, datang ke ruang kerja B.J. Habibie melaporkan bahwa Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita minta berbicara melalui telepon.¹⁷ Ternyata, B.J. Habibie memperoleh laporan bahwa Menko Ekuin bersama 14 menteri yang berada dalam koordinasinya, tidak bersedia lagi duduk di dalam Kabinet Reformasi yang anggotanya sedang disusun. Akan tetapi sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII, mereka akan tetap melaksanakan tugas masing-masing, sampai Kabinet Reformasi terbentuk. Menurut Ginandjar, keputusan itu sudah ditandatangani bersama sebagai hasil rapat di Bappenas, belum dibicarakan dengan Presiden Soeharto, tetapi sudah dilaporkan secara tertulis kepada Presiden yang disampaikan melalui Siti

¹⁶ Dalam buku *Detik-Detik yang Menentukan* (hlm. 33) tertulis Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita minta bicara via telepon pada tanggal 21 Mei 1998. Diduga ini adalah kesalahan ketik. Seharusnya, tanggal 20 Mei 1998, mengingat pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto sudah mengundurkan diri.

¹⁷ Ginandjar juga menjabat sebagai salah satu Sekretaris Koordinator Harian Golkar, di samping Akbar Tandjung, Rahardi Ramelan, Giri Suseno, Letjen Gatot dan Ny. Sulasikin Murpratomo.

Hardiyanti Rukmana—putri tertua Presiden Soeharto. Ke-14 menteri tersebut adalah: Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhiyo, Rahardi Ramelan, Subiarto Tjakrawerdya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Sekitar pukul 17.45 Menteri Keuangan Fuad Bawazier melalui telepon bertanya, “Apakah isu yang berkembang, bahwa Pak Habibie bermaksud mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, benar?” Habibie menjawab bahwa isu itu tidak benar. B.J. Habibie memberitahu Fuad Bawazier mengenai hasil rapat di Bappenas.

Pukul 19.30 B.J. Habibie tiba di Jalan Cendana untuk menghadap Presiden Soeharto. Kali ini, kedatangannya dalam kapasitas sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Ia menunggu sebentar, karena Presiden Soeharto masih menerima mantan Wapres Sudharmono. Siti Hedyati Prabowo, putri kedua Presiden, istri Letjen Prabowo Subianto, menemani B.J. Habibie.

B.J. Habibie bertanya kepada Siti Hedyati Prabowo, “Mengapa Prabowo yang sejak tiga hari saya cari tidak datang ke Kuningan? Apakah dia sedang berada di luar negeri?” Siti Hedyati Prabowo menyampaikan bahwa suaminya berada di dalam negeri dan pesan B.J. Habibie akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan.¹⁸

Akhirnya B.J. Habibie bertemu Presiden Soeharto. Mereka membahas Kabinet Reformasi yang akan segera dibentuk. B.J. Habibie mengusulkan beberapa usulan terhadap konsep yang sudah dipersiapkan Presiden Soeharto. Terjadi perdebatan yang cukup hangat, tidak ada titik temu.

Kemudian, Presiden memanggil Mensesneg Saadilah Mursyid untuk segera membuat keputusan mengenai susunan Kabinet

¹⁸ *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 34-35

Reformasi. Menurut rencana, esoknya di Istana Merdeka, Presiden didampingi Wapres akan mengumumkan susunan Kabinet Reformasi. Selanjutnya, hari Jumat 22 Mei Kabinet Reformasi akan dilantik.

Saadilah Mursyid meninggalkan ruangan. Presiden Soeharto dan B.J. Habibie minum teh bersama. Dalam kesempatan itulah Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa ia bermaksud menyampaikan kepada pimpinan DPR/MPR untuk mengundurkan diri sebagai Presiden setelah Kabinet Reformasi dilantik. B.J. Habibie bertanya, "Pak Harto, kedudukan saya sebagai Wakil Presiden bagaimana?"

Presiden Soeharto menjawab, "Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden."

B.J. Habibie sempat menanyakan apakah Pak Harto sudah menerima surat pernyataan dari Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan ke-14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin. Pak Harto menjawab bahwa ia sudah mendengar dari Tutut, tetapi belum membaca suratnya. Kemudian ia menjabat tangan Habibie sebagai tanda bahwa pertemuan sudah selesai.¹⁹

B.J. Habibie kembali ke kediaman di Jalan Kuningan. Di perjalanan, dia menghubungi ADC Kolonel Djuhana untuk segera berhubungan dengan empat Menko dan semua menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin, dan meminta agar mereka hadir pada Sidang *Ad Hoc* Kabinet Terbatas di kediaman B.J. Habibie di Jalan Kuningan. B.J. Habibie menjelaskan di depan 4 Menko dan 14 menteri yang hadir di pendopo rumahnya, bahwa Kabinet Reformasi telah dibentuk oleh Pak Harto dengan memerhatikan masukan dari Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. B.J. Habibie memohon

¹⁹ *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 36-38

agar para menteri yang telah menandatangani pernyataan bersama agar dapat mempertimbangkan untuk menarik kembali pernyataan mereka, dan ikut memperkuat Kabinet Reformasi.

Setelah diskusi hangat, maka pada pukul 22.45 dicapai kesimpulan:

- (1) susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan;
- (2) menyetujui Keputusan Presiden ditandatangani Pak Harto; dan
- (3) pelantikan dilaksanakan oleh Pak Habibie.

Untuk melaporkan hasil sidang *ad hoc* itu, B.J. Habibie mencoba menghubungi Presiden Soeharto, tetapi Presiden Soeharto tidak bersedia berbicara dengan B.J. Habibie. Presiden Soeharto bahkan menugaskan Mensesneg Saadilah Mursyid untuk menyampaikan bahwa esok harinya pukul 10.00 pagi Pak Harto akan mundur sebagai Presiden. Sesuai UUD 45, Presiden menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Wakil Presiden di Istana Merdeka.²⁰ Semua terkejut mendengar berita tersebut.

Kamis, 21 Mei 1998

Pukul 06.45 ADC Kolonel (Udara) Iwan Sidi menyampaikan kepada B.J. Habibie bahwa Pangab Jenderal Wiranto sudah siap menunggu di ruang tamu. Pukul 06.50 hingga 07.25 Jenderal Wiranto melaporkan keadaan di lapangan yang tidak menentu dan gerakan-gerakan demo yang terus meningkat. Habibie memberi petunjuk untuk mengatasi situasi, lantas memberi instruksi, "Saya tidak benarkan Presiden menerima perwira tinggi ABRI, termasuk Kepala Staf Angkatan, kecuali bersama atau atas permintaan Pangab."

Jenderal Wiranto melaporkan bahwa ia telah menerima Inpres yang telah ditandatangani Presiden Soeharto untuk bertindak demi

²⁰ *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 41

keamanan dan stabilitas negara jikalau keadaan berkembang menjadi khaos dan tidak terkendali.²¹

Jenderal Wiranto menanyakan apa yang harus dia perbuat dengan Inpres itu.

B.J. Habibie menjawab, "Simpanlah Inpres tersebut, mungkin Jenderal akan butuhnya."

Pukul 08.30 Wapres B.J. Habibie berangkat ke Istana Merdeka. Ia mengaku sempat diperlakukan secara "tidak wajar" oleh Presiden Soeharto.

Pukul 10.00 B.J. Habibie dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI.

Susunan kabinet baru akan diumumkan keesokan harinya. Setelah upacara pelantikan, Presiden B.J. Habibie kembali ke kediaman di Kuningan untuk memantau perkembangan situasi terbaru via internet, serta menyusun pesan Presiden RI yang malamnya akan disampaikan melalui TVRI.

Pukul 20.00 pertemuan untuk membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dimulai di kediaman Habibie. Hadir enam tokoh nasional yang diundang oleh Presiden Habibie, yaitu Widjojo Nitisastro, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Suyono, Feisal Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, dan Akbar Tandjung. Sementara sidang berlangsung, Habibie sempat menemui beberapa tamu, a.l. Amien Rais, Pangab Jenderal Wiranto, dan Pangkostrad Letjen Prabowo—semuanya memberi masukan. Dalam penyusunan anggota kabinet itu, muncul beberapa nama kandidat Pangab, yaitu KSAD Jenderal Subagyo, Letjen A.M. Hendropriyono, dan Letjen Yunus Yosfiah.²²

Akhirnya pada pukul 01.30 Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk. Pukul 01.45 pertemuan ditutup.²³

²¹ Menurut B.J. Habibie, Inpres ini mungkin semacam Supersemar pada tahun 1966 (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm 61)

Malam itu juga, sekitar pukul 03.00, di kubu Prabowo muncul gagasan untuk menghadap Jenderal Besar A.H. Nasution, karena beliau adalah figur yang paling dihormati oleh Habibie. Diputuskan bahwa esok harinya, pagi-pagi sekali, Mayjen Kivlan menghadap ke rumah Jenderal Nasution untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mengusahakan “jago”-nya untuk menjadi Panglima ABRI yang baru.

Jumat, 22 Mei 1998

Pukul 06.10 pagi, Presiden Habibie menelepon Jenderal Wiranto dan menyampaikan bahwa dia memilih sang jenderal untuk tetap menjadi Menhankam/Pangab. Jenderal Wiranto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan ia memohon petunjuk.²⁴

²² Letjen Prabowo bersama Mayjen Muchdi PR menghadap Habibie pukul 23.00 di Kuningan dengan membawa konsep susunan kabinet Habibie yang disiapkan oleh Mayjen Kivlan Zen, Fadli Zon, dan Din Syamsudin. Hal ini berani dilakukan Letjen Prabowo karena kedekatannya dengan Habibie selama ini. Prabowo punya andil mendukung Habibie menjadi Wakil Presiden (*Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm 89-90)

²³ Hingga saat itu, satu posisi masih lowong, yaitu Menhankam/Pangab. Menurut Kivlan, calon terkuat Pangab adalah Letjen Hendropriyono. Namun Jenderal Wiranto berhasil melakukan berbagai manuver dan memengaruhi Presiden Habibie antara lain dengan mengatakan ada pasukan liar mengepung rumah Presiden (*Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 90). Dalam bukunya, Habibie mengungkapkan, “Tidak benar bahwa saya reaktif dan seenaknya dalam menentukan sebuah keputusan, apalagi keputusan sangat penting seperti penentuan posisi Menhankam/Pangab... Hanya saja, sampai detik-detik terakhir saya tidak mau berbicara, siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab. Tetapi di dalam hati saya, keputusan siapa yang pantas menjadi Menhankam/Pangab telah saya tetapkan.” (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 79)

²⁴ Menurut Kivlan Zen, pagi itu Jenderal Wiranto ada di kediaman Habibie. Keinginan Kivlan dan Muchdi PR untuk bertemu Habibie digagalkan oleh Sintong Panjaitan—yang dinilai Kivlan berada di kubu Wiranto dalam konflik antara Wiranto dan Prabowo (lihat *Konflik dan Integrasi TNI AD*, hlm. 90)

Sekitar pukul 07.30 pagi, staf khusus kepresidenan Mayjen Sintong Panjaitan²⁵ masuk ke ruangan kerja Presiden Habibie untuk memohon agar Presiden menerima kedatangan Danjen Kopasus Mayjen Muchdi P.R. bersama Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivilan Zen yang membawa surat dari Pangkostrad dan dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Presiden Habibie ragu-ragu dan sempat menginstruksikan Sintong Panjaitan agar menerima surat itu atas nama dirinya. Namun Sintong menyarankan agar menerima surat itu langsung. Akhirnya Presiden Habibie menemui kedua jenderal yang membawa surat. Setelah Habibie membaca surat tersebut,²⁶ kedua jenderal mengucapkan, "Mohon petunjuk."

Presiden menjawab singkat, "Sudah 'saya baca.'"

Kedua jenderal mengulangi bertanya, "Mohon petunjuk."

Jawaban Presiden Habibie menjawab singkat seperti semula, "Sudah saya baca."

Presiden Habibie kembali ke ruang kerja.

Pukul 09.00 Presiden meninggalkan kediaman Kuningan menuju Istana Merdeka. Di depan tangga istana, Pangab Wiranto

²⁵ Sintong Panjaitan adalah asisten Habibie. Posisi Sintong naik turun. Namanya menjulang ketika tahun 1981 memimpin tim Kopassus menggagalkan pembajakan pesawat Garuda di Bangkok, Thailand. Sepuluh tahun kemudian, ia tak punya jabatan karena dianggap bertanggung jawab atas insiden berdarah di Dili, Timor Timur. Karier Sintong kembali bersinar setelah Habibie memintakan pengampunan dari Soeharto. Sintong termasuk salah satu yang membaca memoar Habibie sebelum dicetak. Dia memberikan komentar, "... isinya bagus, tetapi kurang lengkap." (*Kompas*, 20 September 2006). Habibie membenarkan komentar itu dan mengungkapkan kepada sejumlah wartawan media massa. "Memang, saya sengaja tidak membeberkan semua, hanya sekitar 70 persen. Sisanya masih belum saya ungkapkan karena saya tidak ingin memperburuk suasana dan memojokkan pribadi seseorang."

²⁶ Surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution berisi saran agar KSAD Jenderal Subagyo HS diangkat menjadi Pangab dan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto menjadi KSAD.

menantikan kedatangan Presiden, dan memohon untuk diperkenankan melaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata. Dalam kesempatan bicara berdua dengan Presiden, Pangab Wiranto melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman Presiden di Kuningan, demikian pula di Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohon petunjuk.

Dari laporan tersebut, Presiden Habibie menyimpulkan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. Presiden Habibie langsung memberikan instruksi, "Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad sudah harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing."

Jenderal Wiranto bertanya, "Sebelum matahari terbenam?"

Presiden Habibie mengulangi, "Sebelum matahari terbenam!"

Jenderal Wiranto bertanya lagi, "Siapa yang akan mengganti?"

Presiden Habibie menjawab, "Terserah Pangab."

Sebelum Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, ia menyampaikan bahwa untuk mengamankan keluarga Presiden, ia sudah menginstruksikan agar mengumpulkan seluruh keluarga Presiden di Wisma Negara. Presiden bertanya, "Untuk berapa lama kami harus tinggal di Wisma Negara?"

"Tergantung perkembangan keadaan," jawab Pangab.²⁷

²⁷ Setelah Jenderal Wiranto meninggalkannya, Presiden Habibie memikirkan hal-hal buruk yang mungkin menyimpannya. "Mengapa keluarga saya harus dikumpulkan di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jika lalu anak-anak dan cucu-cucu saya tinggal di tempatnya masing-masing dan dilindungi oleh Pasukan Keamanan Presiden? Mengapa mereka harus dikumpulkan di satu tempat?" (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 83-84). "Saya teringat nasib keluarga Tsar Romanov dari Rusia yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Pemikiran yang mengerikan timbul." (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 96)

Hari itu juga Presiden Habibie mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Setelah itu dia menerima tamu-tamu: Jaksa Agung serta wakilnya, serta Gubernur Bank Indonesia yang didampingi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita.

Siang harinya, Presiden B.J. Habibie menerima telepon dari Pangab Jenderal Wiranto yang melaporkan bahwa Pangab mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Djamari Chaniago²⁸ untuk menjadi Pangkostrad. Namun, memerhatikan instruksi Presiden agar pergantian Pangkostrad harus dilaksanakan sebelum matahari terbenam, dan karena masalah teknis pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru dapat dilaksanakan keesokan harinya, maka Pangkostrad sementara akan dijabat oleh Asisten Operasi Pangab, Mayjen Johny Lumintang. Kepada Mayjen Johny Lumintang akan diperintahkan untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam. Presiden B.J. Habibie menyetujui usul tersebut.

Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ajudan melaporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto ingin bertemu Presiden.²⁹ Akhirnya Presiden Habibie memutuskan akan menerima Pangkostrad setelah dia makan siang bersama keluarga di Wisma Negara.

Setelah makan siang, Presiden Habibie menerima Pangkostrad Letjen Prabowo yang memasuki ruangan tanpa membawa senjata

²⁸ Mayjen Djamari Chaniago adalah kawan dekat Prabowo sejak masih berpangkat letnan kolonel.

²⁹ Presiden Habibie menyatakan keraguannya untuk menerima Pangkostrad. "Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Apakah beliau (*Pak Harto-ed*) tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu dengan saya? Menurut peraturan yang berlaku, siapa saja yang menghadap Presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Tentunya itu berlaku pula untuk Panglima Kostrad. Namun, bagaimana halnya dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani?" (*Detik-Detik yang Menentukan*, hlm 95).

apa pun. Habibie merasa puas. Terjadi dialog antara Presiden Habibie dan Pangkostrad Letjen Prabowo, dalam bahasa Inggris.³⁰

Letjen Prabowo mengungkapkan, “Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya³¹ dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto (*sic*),³² Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.”

“Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti,” jawab Habibie.

“Mengapa?” tanya Prabowo.

Presiden Habibie menyampaikan, dia mendapat laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka.

“Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kata Prabowo.

³⁰ Dialog ini semata-mata bersumber pada memoar Habibie. Kepada media massa, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menyatakan keheranannya atas apa yang ditulis Habibie di halaman 102 buku *Detik-detik yang Menentukan* yang sehari setelah peluncurannya langsung menjadi kontroversi. Dia mengaku tidak diminta konfirmasi soal ini sebelumnya oleh Habibie.

³¹ Maksudnya, keluarga besar Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, “begawan ekonomi” yang namanya amat dihormati kalangan ekonom. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo pernah mengeluarkan sinyalemen kontroversial bahwa dana pembangunan di Indonesia bocor 30%. Inti pemikirannya, korupsi membuat penggunaan dana pembangunan tidak efektif karena sepertiganya menguap, setidaknya bila dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Thailand. Sinyalemen itu sempat menjadi polemik yang ramai, dan membuat hubungan Prof. Sumitro menjadi semakin renggang dengan besannya, Presiden Soeharto. Mei 1998, dua orang dalam keluarga Prof. Sumitro diakhiri karirnya secara tragis. Selain Prabowo, juga Soedrajat Djiwandono yang dicopot bulan Februari 1998 dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia—hanya 10 hari menjelang masa jabatannya berakhir. Penyebabnya, Soedrajat menolak menerapkan CBS (*Currency Board System*) dari proposal Dr. Steve Hanke. Soeharto tampaknya menginginkan CBS sebagai jalan pintas menjaga kejatuhan nilai rupiah, walaupun belakangan disadari bahwa cara itu tidaklah realistis.

³² Menurut catatan Habibie, Letjen Prabowo masih menyebut mertuanya dengan ‘Presiden Soeharto’, walaupun yang bersangkutan telah mundur dari jabatan Presiden sehari sebelumnya.

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," jawab Habibie.

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo dengan nada marah.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie.

Kemudian, menurut Habibie, Prabowo memohon atas nama ayahnya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan ayah mertuanya Soeharto, agar Presiden Habibie memberikan waktu tiga bulan kepadanya untuk tetap menguasai pasukan Kostrad.

Presiden Habibie menjawab dengan nada tegas, "Tidak! Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru!"

"Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya!"

"Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja," kata Presiden Habibie.

"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!" jawab Prabowo.

"Ini tidak mungkin, Prabowo!"

Pintu terbuka, dan Mayjen Sintong Panjaitan masuk dan mengatakan kepada Letjen Prabowo, "Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan."

"Sebentar," kata Presiden Habibie, dan Sintong pun meninggalkan ruangan.

Letjen Prabowo meminta waktu untuk dapat berbicara melalui telepon dengan Pangab. Presiden Habibie menugaskan salah satu ADC untuk segera menghubungi Pangab. Setelah menelepon ke

Mabes ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa Pangab tidak bisa dihubungi.

Akhirnya Letjen Prabowo pun meninggalkan ruangan Presiden. Sebelum berpisah, Presiden Habibie menyatakan sempat memeluk Letjen Prabowo dan menyampaikan salam hormat untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo.

Sekitar pukul 22.00 Presiden Habibie mendapat laporan dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden bahwa keadaan sudah kembali tenang dan terkendali. Keluarga Presiden Habibie dipernahkan kembali ke Kuningan dengan pengamanan lebih ketat.

Bab 1

Cerita di Balik *Lengser-nya Soeharto*

Mei 1998, Indonesia dilanda gelombang perubahan yang Manarkis. Diawali penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Universitas Trisakti, kerusuhan massal melanda ibukota. Gelombang demonstran menduduki gedung DPR/MPR. Melihat arah angin yang tidak menguntungkan, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepresidenan kepada wakilnya, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Soeharto mengumumkan bahwa setelah *lengser keprabon* (meninggalkan tahta), dia akan *madeg pandhita* (menjauhkan diri dari keramaian untuk mencari kesetiaan hidup).

Dari permukaan, transisi kekuasaan itu tampak begitu mulus. Namun di baliknya, terdapat banyak kontroversi. Selain pertanyaan besar tentang siapa otak di balik penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, serta siapa dalang kerusuhan massal, muncul pula

kontroversi mengenai “kudeta” Letjen Prabowo Subianto—menantu Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Adanya pergerakan pasukan yang tidak diketahui Pangab, memicu kontroversi tersebut. Selain itu, aroma cerita kudeta kian sedap ketika orang menghubungkan Prabowo dengan apa yang akan dilakukan Soeharto, mertuanya, 33 tahun sebelumnya. Pada tahun 1965, ketika meletus Peristiwa Gerakan 30 September, Soeharto juga menjabat Pangkostrad—dengan pangkat Mayor Jenderal. Dengan merangkul Pangdam V Jaya Mayen TNI Umar Wirahadikusumah dan Komandan Pasukan Elit RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) Kol. Sarwo Edhie Wibowo, Mayjen Soeharto berhasil mengkonsolidasikan kekuatan bersenjata. Tujuan jangka pendeknya adalah memberangus G 30 S/PKI, namun dalam jangka panjang kelompok Soeharto dan kawan-kawan membangun dan memperkuat posisi AD dalam *bargaining position* dengan Presiden Soekarno.

Pada tahun 1998, Pangkostrad Letjen Prabowo merupakan rekan baik Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin. Dia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pasukan elit Kopassus yang dikomandani oleh Mayjen Muchdi P.R. Letjen Prabowo sendiri merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus. Akan tetapi, bedanya dibandingkan tahun 1965, pada tahun 1998 masih ada tiga orang yang secara struktural berada di atas Letjen Prabowo—yaitu Pangab Jenderal Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo HS, dan Wakil KSAD Letjen Sugiono. Prabowo di tahun 1998 tidak sama dengan Soeharto di tahun 1965-1966.

Tentu saja, kudeta Prabowo merupakan rumor yang tidak terbukti kebenarannya. Memang tidak ada bukti mutlak Letjen Prabowo cs berniat melakukan kudeta. Akan tetapi, terbitnya memoar

Habibie yang kontroversial mengaku persoalan tersebut sekali lagi. Habibie mengaku menulis memoarnya berdasarkan catatan yang ada padanya, bukan berdasarkan kesaksian orang lain. Kendati tidak menyebut-nyebut istilah “kudeta”, namun pergerakan pasukan yang tidak diketahui Pangab serta sikap Prabowo yang diceritakan menemui Presiden dan berkata-kata secara emosional, bisa membuat orang berpikir lain.

Kontroversi Memoar Habibie

Kesaksian Habibie yang terkuak dari memoarnya, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, memperkuat prasangka adanya resistensi Prabowo terhadap penguasa yang baru. Ungkapan Prabowo yang mengatakan Habibie sebagai presiden naif, juga menimbulkan kontroversi—benarkah Prabowo mengatakan kalimat yang persis seperti itu?

Memoar Habibie itu terbit tujuh tahun setelah ia melepas jabatan presiden, ketika usianya memasuki 70 tahun. Ia menunggu gejolak mereda hingga memoarnya tidak perlu memantik kontroversi politik. Dengan begitu, apa yang ia ungkapkan bisa diterima dengan pikiran jernih. Namun, kenyataan berkata lain. Penerbitan buku itu justru memicu kembali perdebatan lama antara kelompok Prabowo dan Wiranto—di samping kubu Habibie sendiri.³³

³³ Pertama kali isu kudeta dan penggepungan kediaman Presiden dilontarkan oleh Presiden Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, 15 Februari 1999. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan pasukan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie. Anehnya, Pangab Jenderal TNI Wiranto membantah dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, informasi yang diterima Habibie bersumber dari Wiranto. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, “Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habibie atau Wiranto, pasti berdusta,” (Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, hlm. 437-438)

Yang paling menarik adalah uraian Habibie yang tampak meluruskan isu-isu seputar “ancaman” Prabowo yang sempat berkembang di masyarakat. Menurut kabar burung yang beredar pada saat itu, Prabowo sambil membawa senjata mendatangi Habibie untuk meminta jabatan Pangab. Ternyata, isu itu tidak benar sama sekali.

Habibie bertutur, pada pagi hari 22 Mei, ia mendapat kabar tentang adanya gerakan pasukan Kostrad ke Jakarta. Ia menilai, pengerahan pasukan ini berada di luar pengetahuan dan koordinasi Pangab. Lalu ia meminta Wiranto segera mengganti Pangkostrad, yang ketika itu dijabat Prabowo, hari itu juga.

Rupanya, Prabowo tidak bisa menerima pencopotan dirinya. Ia datang ke istana dan menemui Habibie setelah makan siang. Menurut Habibie, Prabowo sama sekali tak membawa senjata. Dalam dialog itu terungkap, Prabowo ternyata berniat mengamankan presiden dan meminta pencopotannya diralat. Habibie bertahan pada pendiriannya. Ia juga seperti memaklumi sikap kritis Prabowo yang dinilainya dibesarkan dalam lingkungan intelektual dan rasional.

Menanggapi terbitnya buku Habibie, Kamis 28 September 2006 Prabowo Subianto menggelar jumpa pers dan mengharapkan Habibie merevisi buku yang ditulisnya, khusus tentang dialog antara Habibie dengan dirinya. Prabowo merasa perlu ada klarifikasi dan menegaskan bahwa dalam perbincangannya dengan Habibie pada 22 Mei 1998 tidak ada peristiwa “membentak-bentak” Presiden seperti yang ditulis Habibie dalam bukunya, walau dia mengakui bahwa dirinya sempat *shock* karena dicopot secara tiba-tiba.

30% Sisanya?

Buku Habibie disusun berdasarkan catatan hariannya. Di sela kesibukannya sebagai pejabat tinggi hingga menjadi Presiden, B.J. Habibie mengaku selalu membuat catatan. Jadi, jika hanya berda-

sarkan catatan harian yang bersifat pribadi, apa yang diungkapkan Habibie dalam bukunya memang sangat subyektif.

Kendati demikian, Habibie mengaku bahwa tidak seluruh catatannya dimasukkan dalam buku tersebut. Habibie mengatakan bahwa masih ada 30 persen catatannya yang belum diungkapkan. Memoarnya itu ternyata hanya mencakup 70% dari catatan harian yang dibuatnya. “Ada 30 persen yang belum saya ungkapkan. Karena jika ditulis sekarang bisa menimbulkan gejolak,” kata Habibie di kantor The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 30 September 2006. Itu berarti, masih ada detail-detail lain yang mungkin lebih penting yang belum diungkapkan oleh Habibie.

Habibie berjanji, sisa 30 persen dari catatan hariannya akan ditulis pada saat yang tepat. Hingga kini, catatan itu masih disimpan dengan rapi. Tidak seorang pun boleh mengetahui isinya termasuk istrinya tercinta dan seluruh keluarganya.

“Catatan saya masih ada karena semua orang tahu kalau saya selalu membawa catatan setiap kerja,” ujarnya. “Ini tidak boleh dibuka. Nanti pada tahun 2025,” dia menambahkan. Namun dia menolak menjawab ketika didesak apa saja isi 30 persen catatan yang belum terpublikasikan itu.

Diburu Kejaksaan Agung

Terbitnya buku Habibie, yang direspons langsung oleh Prabowo, menimbulkan polemik yang meluas. Sebagaimana diberitakan harian *Rakyat Merdeka* edisi 3 Oktober 2006, Kejaksaan Agung (Kejagung) diam-diam ikut “memburu” buku karya bekas Presiden B.J. Habibie. Intelijen Kejagung tampaknya tertarik meneliti buku tersebut terkait kontroversi terjadinya kudeta pada Mei 1998 versi Habibie dan mantan Pengkostrad Letjen (purn) Prabowo Subianto.

Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin mengaku, telah memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan buku tersebut ke sejumlah toko buku. Namun, menurut dia, terlalu dini untuk menjadikan buku tersebut dalam penelitian kejaksaan. Sebab, Muchtar mengaku belum membaca buku kontroversial tersebut.

Yang pasti, lanjut Muchtar, kejaksaan punya kewenangan meneliti buku. Ini karena buku termasuk barang cetakan, yang dapat diawasi kejaksaan. Dia lantas mengutip ketentuan yang tertulis pada pasal 30 ayat (3) huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. "Dalam ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan ikut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan," jelas Muchtar.³⁴

Polemik yang Muncul

Sementara itu sejarawan Anhar Gonggong dalam diskusi "Penulisan Sejarah dan Kontroversi Buku Habibie" mengatakan buku Habibie *debatable* atau bisa dibantah. Sebab, buku itu bukan sebuah buku sejarah. Menurut Anhar, buku Habibie itu bukan sebuah buku yang dijadikan pedoman untuk pelajaran sejarah di sekolah. "Buku itu hanyalah sebuah dokumen sejarah yang berasal dari catatan harian seorang Habibie," dia mengungkapkan. Jadi apabila buku yang disusun Habibie itu menuai kontroversi adalah hal yang sangat wajar. "Karena itu, saksi sejarah di seputar Habibie harus memberikan kesaksiannya, sehingga didapatkan sebuah sumber pembandingan yang lengkap," tandas dia.

³⁴ Muchtar mengatakan, dalam melaksanakan tugas tersebut, kejaksaan masih dan telah menyelesaikan penelitian sejumlah buku. Yang masih diteliti, diantaranya, penulisan buku sejarah SD hingga SMA kurikulum 2004 yang tidak mencantumkan singkatan PKI (Partai Komunis Indonesia) di belakang kata G30S (Gerakan 30 September 1965), dan buku berjudul *Soekarno File* yang ditulis penulis asal Belanda Anthony Ch Dake.

Polemik antara BJ Habibie dan mantan Pangkostrad Prabowo dalam menyikapi buku yang diterbitkan mantan presiden RI itu sebetulnya merupakan hal yang wajar, namun jangan sampai terjebak ke arah “*over claimed*” (mengklaim secara berlebihan), karena dapat membingungkan bahkan menyesatkan publik. Demikian kesimpulan pengamat politik dan militer J Kristiadi dan pakar komunikasi politik Effendy Gazali di Jakarta, Kamis (28/9), menyusul penerbitan buku berjudul *Detik-detik yang Menentukan* oleh mantan Presiden BJ Habibie, sebagaimana dilansir dalam *website* Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

J Kristiadi mengatakan, perdebatan yang terjadi antara kedua orang itu begitu sengit dan sangat diametral (bertentangan), padahal mereka merupakan tokoh-tokoh besar pada masa itu. Pernyataan keduanya bisa membingungkan masyarakat. “Apa yang mereka kemukakan pada publik lewat media begitu sengit, sangat kontroversi dan sangat diametral, sehingga mana yang bisa dipercaya. Akibatnya justru membingungkan masyarakat bahkan bisa menyesatkan rakyat,” kata peneliti senior CSIS itu.

Pakar komunikasi politik dari UI Effendy Gazali mengatakan, apa yang terjadi sebetulnya merupakan hal yang wajar saja, karena sejarah pasti dimaknai secara subyektif, namun semestinya jangan sampai melakukan klaim kebenaran secara berlebihan atas kebenaran versinya tersebut. “Kita tidak bisa memaksakan orang untuk masuk dalam kebenaran versi kita. Perdebatan antara Habibie dan Prabowo wajar saja, namun harus tetap dilakukan secara elegan dan jangan *over claimed*,” ujar Effendy, sebagaimana dilansir *website* yang sama. Menurut dia, sejarah itu bergerak dinamis. Untuk bisa memahami sejarah, sejarah itu sendiri harus dibaca kemudian dikritisi, dibaca lagi dan dikritisi lagi.

Bab 2

“Perang Dingin” Soeharto – Habibie

Berdasarkan catatan harian yang dibuatnya, B.J. Habibie mengungkapkan adanya drama, pergolakan, perdebatan, dan apa saja yang selama itu terjadi. Buku Habibie bukan cuma mengungkap isi pembicaraannya dengan Prabowo, melainkan juga “perang dingin” antara dirinya dan Presiden Soeharto beberapa hari sebelum dan setelah orang kuat Orde Baru itu *lengser*.

Bagaimana pada hari Pak Harto (21/5/1998) mundur dan Habibie dilantik sebagai presiden baru, ia “dibiarkan” tanpa disapa meski sudah mengejar Soeharto dari Cendana sampai Istana Merdeka. “Presiden Soeharto, manusia yang sangat saya hormati, cintai, dan kagumi, ternyata menganggap saya seperti tidak pernah ada” begitulah ungkap Habibie dalam bukunya.

Selain itu, ternyata telah ada jadwal yang disusun Pak Harto bersama Habibie pada Rabu (20/5/1998) sore di Cendana, bahwa pada hari Kamis akan diumumkan susunan Kabinet Reformasi,

Jumat pelantikan, dan pada hari Sabtu Presiden Soeharto baru akan menyatakan mengundurkan diri. Jadwal inilah yang kemudian disampaikan Habibie dalam sidang *ad hoc* kabinet pada Rabu malam di Kuningan, dihadiri empat menteri koordinator dan 14 menteri.

Pak Harto menolak telepon Habibie yang ingin melaporkan hasil pertemuan Kuningan. Sebaliknya, Mensesneg Saadilah Mursyid menyampaikan keputusan Pak Harto, Kamis (21/5/1998) pukul 10.00, bahwa Pak Harto akan *lengser* dan Habibie akan langsung dilantik sebagai presiden baru.

Buku memoar Habibie menuai sejumlah pertanyaan. Mengapa sikap Pak Harto berubah dengan cepat? Rabu sore masih menjadwalkan akan melantik Kabinet Reformasi, Rabu malam mendadak langsung ingin *lengser*?

Supir yang Diragukan

Tentang dirinya yang sekonyong-konyong mendapat mandat menjadi Presiden RI, B.J. Habibie melukiskan dalam bukunya, "Saat itu ibaratnya kita dalam bus yang sedang melaju. Tiba-tiba sopirnya kena serangan jantung. Sebagai wakil sopir, saya langsung mengambil alih kemudi. Penumpang gempar, sebagian berteriak, belok kiri. Sebagian bilang, ambil jalan kanan, lainnya menyarankan, tetap jalan lurus. Mereka yang di luar bus juga ikut berkomentar, balik saja jalannya buntu."

Memang, B.J. Habibie dipercaya menjadi Presiden RI pada saat negeri ini sedang dalam kekacauan yang memuncak. Kepercayaan begitu sulit, rumor berseliweran, dan penegakan hukum menjadi tugas berat.

Sesaat setelah Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI menggantikan Jenderal Besar H.M. Soeharto, badan ra-

hasia Amerika Serikat CIA (*Central Intelligence Agency*) mengeluarkan opininya bahwa Habibie adalah “tipe pejabat yang dibutuhkan di negara-negara sedang berkembang”. John Howard, seorang koresponden salah satu media di AS mengungkapkan, ia memiliki dokumen tentang Habibie yang diperolehnya dari Departemen Perdagangan AS. Dokumen itu telah dideklasifikasi sehingga bisa diakses oleh publik.

Mengutip dokumen tersebut: “*Bacharuddin Jusuf HABIBIE*” (dibaca: *haBeebee*). Habibie fasih berbicara bahasa Inggris dan Jerman, ia telah sering mengunjungi AS, Jepang, dan Eropa Barat dalam perjalanan untuk kepentingan teknologi. Dia suka beregang dan mendengarkan musik. Dia dan istrinya, Ainun, seorang ahli fisika, mempunyai dua laki-laki; keduanya belajar teknik di Jerman. Saudaranya Jusuf Effendy (J.E.) Habibie mengepalai direktorat jenderal komunikasi laut pada Kementerian Komunikasi.”

Laporan intelijen tentang Habibie menyebutkan juga pengalamannya bekerja sebagai insinyur di perusahaan Jerman, Messerschmitt, dan sebagai menteri teknologi Indonesia, ingin membuat pembangkit listrik tenaga nuklir komersial bertenaga 7.000 megawatt pada awal abad 21. Dokumen itu juga menggarisbawahi bahwa B.J. Habibie dipanggil pulang ke tanah airnya oleh mantan Presiden Soeharto untuk mengepalai industri pesawat terbang domestik. Dia juga mengepalai industri-industri strategis yang membuatnya mampu mengendalikan 10 perusahaan milik negara, termasuk yang mengendalikan sistem satelit TV.³⁵

Naiknya Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto, memang memicu perhatian internasional. Banyak yang merasa Habibie adalah figur yang pas. Namun ada pula yang skeptis dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinannya.

Setelah pagi itu Presiden Soeharto menyatakan mundur, dan Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden baru, segera setelah itu berbagai pernyataan negatif tentang kepemimpinannya bermunculan. Bukan saja dari dalam, juga dari luar negeri. Pemberitaan pers yang mengutip pernyataan tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengannya kerap dirasakannya menyakitkan hati. Lee Kuan Yew, misalnya. Menteri Senior Singapura itu secara terbuka meragukan kemampuannya.³⁵

Pada sisi lain, Habibie mengaku bangga, pilihannya tepat dan dia ikut mengawali jalan panjang Indonesia menuju kehidupan demokratis. Selama 17 bulan memimpin pemerintahan RI, Habibie mengaku banyak mengambil keputusan tidak populer, misalnya

³⁵ Dokumen itu menyebutkan, pada tahun 1994 AS dan Perancis bersaing untuk menempatkan Satelit Palapa C pada orbitnya. Sebuah dokumen tertanggal 1 November 1994 menuduh Perancis menyuap pemerintahan Soeharto untuk memenangkan persaingan bisnis mengorbitkan satelit itu untuk kepentingan Indonesia. Dokumen Kementerian Perdagangan AS itu mencatat, "Ada juga kecurigaan bahwa Perancis telah membayar uang insentif untuk orang-orang Indonesia, tetapi ini tidak bisa dikonfirmasi". Dokumen yang lain menyebutkan: "General Dynamics sedang mengajukan penawaran untuk mengorbitkan satelit Palapa C yang baru. Paket untuk meluncurkan generasi ketiga satelit itu nilainya US\$ 300 juta". Dokumen itu meneruskannya dengan catatan: "Pemerintahan Perancis dalam upaya mematahkan monopoli AS selama 20 tahun dalam peluncuran satelit itu, secara terbuka telah mendukung program peluncuran satelit oleh Arianespace".

³⁶ Dalam memoarnya, Habibie menuturkan dirinya menghadapi berbagai pernyataan minor itu dengan lapang dada. Habibie punya pendirian sendiri yang ia pegang teguh. "Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan mereka yang sehaluan dengan Senior Minister Lee Kuan Yew akan lebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan bahwa mereka keliru," tulis Habibie dalam bukunya. Belakangan, Lee Kuan Yew meralat sikapnya. Itu diketahui Habibie dari surat yang dilayangkan sang menteri senior itu lewat Menteri Negara BUMN Tanri Abeng. Lee mengucapkan selamat atas keberhasilan B.J. Habibie menghentikan jatuh bebasnya mata uang rupiah terhadap dolar dan kemampuan pemerintahannya menekan inflasi.

tentang kemandirian Bank Indonesia, Jaksa Agung tidak lagi menjadi anggota kabinet, dan penyelesaian persoalan Timor Timur.

Memang Timtim warisan rumit yang terpaksa harus ditanganinya. Pada kaitan ini ia memuji peran Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang jadi ujung tombak perundingan dengan PBB. "Beliau melakukan secara profesional oleh karena sadar, kebijakan menyelesaikan soal Timtim adalah keputusan kabinet."

Kebijakan pemberian penentuan pendapat mendorong lepasnya Timtim. Namun, menurut Habibie, kebijakan itu kemudian bisa disetujui lewat terbitnya Ketetapan MPR Nomor V Tahun 1999. Bahwa karena persoalan itu Habibie akhirnya tak lagi jadi presiden, katanya, "Biarkan semua kekurangan menjadi milik saya. Kerja, karya, dan hasil yang saya capai seluruhnya terpulang kepada rakyat, pemilik sejati negeri ini."

Siapakah Habibie?

Sosok pria yang gampang dikenal karena pembawaan dan gaya bicaranya yang khas itu dilahirkan di Pare-Pare, 25 Juni 1936. Dia lahir sebagai anak keempat dari delapan bersaudara putera-puteri pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ny. R.A. Tuti Marini Puspo-wardoyo. Ia menikahi dr. Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Dari kedua anaknya, Ilham Akbar dan Thareq Kemal, ia mendapatkan empat orang cucu. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI Ketiga pada tahun 1998-1999, dan setelah itu menjadi pendiri serta ketua Dewan Pembina The Habibie Center.

Habibie menamatkan pendidikannya di ITB Bandung, tahun 1954. Kemudian ia melanjutkan studi ke Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar Diplom-Ingenieur, predikat *Cum laude* pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang

(1955-1960). Gelar doktor konstruksi pesawat terbang didapatkan-nya dari Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan predikat *Summa Cum laude*, pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1960-1965). Ia menyampaikan pidato pengukuhan gelar profesor tentang konstruksi pesawat terbang di ITB Bandung, pada tahun 1977.

Kariernya dimulai sebagai Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau GmbH, Hamburg, Jerman antara tahun 1965-1969. Antara tahun 1969 sampai 1973 dia menjadi Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Pesawat Komersial dan Angkut Militer MBB GmbH, di Hamburg dan Munchen. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden dan Direktur Teknologi pada MBB GmbH, Hamburg dan Munchen tahun 1973-1978. Kemudian menjadi Penasihat Senior Teknologi pada Dewan Direksi MBB tahun 1978.

Sepulang ke Indonesia, ia memimpin Divisi *Advanced Technology* Pertamina, yang merupakan cikal bakal BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), tahun 1974-1978. Kemudian dia penasihat Pemerintah Indonesia di Bidang Pengembangan Teknologi dan Pesawat Terbang, yang bertanggungjawab langsung pada Presiden RI Soeharto pada tahun 1974-1978.

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie dipercaya menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Ketua BPPT tahun 1978-1998. Kemudian, ia dipercaya menjadi Wakil Presiden R.I., jabatan yang hanya diembannya sejak 11 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Dua bulan menjabat Wapres, ia kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan itu diembannya hingga 20 Oktober 1999, setelah dia digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid.

Habibie merupakan peraih penghargaan prestisius Theodore van Karman Award dari pemerintah China. Karir politiknya meroket setelah di awal dekade 90-an, ia mendirikan dan menjadi Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Sebuah organisasi yang merepresentasikan kebangkitan intelektual Islam dalam jagat politik praktis.

Mantan Presiden RI Ketiga, Si Jenius ilmuwan konstruksi pesawat terbang, ini selalu menjadi berita hangat jika menginjakkan kakinya di tanah air, sepulang dari 'tanah idamannya' Jerman. Kali ini, ia menerbitkan dan meluncurkan bukunya yang kontroversial, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Buku setelah 549 halaman itu pun ludes diburu masyarakat yang ingin tahu rahasia apa yang diungkap Habibie.

Pada masa emas kejayaan dengan segudang jabatan diemban, dialah manusia paling multidimensional di Indonesia. Ia manusia cerdas ajaib yang sempat menghadirkan selaksa harapan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri ini. Sepakterjangnya penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Dia hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat *Summa Cum laude*. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia dia 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan negara dalam payung BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis), dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan "profesor" politiknya Soeharto. Soeharto yang tampaknya merasa dikhianatinya menyerahkan

jabatan presiden itu kepadanya berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.³⁷ Spekulasi perihal dugaan pengkhianatan ini makin berkembang tatkala Soeharto tidak pernah membuka pintu bagi Habibie sejak dilantik menjadi presiden.

Angan-Angan yang Terlalu Tinggi

Keinginan Habibie mengakselerasi pembangunan sesungguhnya sudah dimulainya di industri pesawat terbang IPTN dengan menjalankan program evolusi empat tahapan alih teknologi yang dipercepat “berawal dari akhir dan berakhir di awal”.

Empat tahapan alih teknologi itu, pertama, memproduksi pesawat terbang berdasarkan lisensi utuh dari industri pesawat terbang lain, hasilnya adalah NC 212 lisensi dari Casa Spanyol. Kedua, memproduksi pesawat terbang secara bersama-sama, hasilnya adalah *Tetuko* CN-235 berkapasitas 30-35 penumpang yang merupakan produksi kerjasama secara *equal* antara IPTN dengan Casa Spanyol.³⁸

³⁷ Tampaknya Habibie dicurigai Soeharto sebagai dalang penolakan 14 menteri untuk duduk kembali dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang direncanakan Soeharto, suatu dugaan yang tak pernah diklarifikasi sehingga masyarakat tak pernah tahu kebenarannya.

³⁸ *Tetuko* adalah nama jabang bayi Gatotkaca yang digodok di Kawah Candradimuka—sebuah penamaan yang khas Presiden Soeharto yang berlatar belakang kultur Jawa sangat kental. Namun, CN 235 sulit dipasarkan sehingga industri penerbangan Indonesia mengalami kerugian besar. Itulah sebabnya, secara satiris, *Tetuko* sering dipelesetkan menjadi “*sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko*” (bahasa Jawa yang artinya “yang datang tak kunjung beli, yang beli tak kunjung datang”). Sindiran itu pada umumnya muncul dari kalangan ekonom aliran *Widjojonomics* yang pada dekade 90-an berseberangan gagasan dengan ekonom beraliran *Habibienomics*. Kedua aliran itu berbeda pendapat mengenai basis pengembangan industri nasional. Ekonom aliran *Widjojonomics* juga mendapat julukan yang menyindir, yaitu “Mafia Berkeley”.

Ketiga, mengintegrasikan seluruh teknologi dan sistem konstruksi pesawat terbang yang paling mutakhir yang ada di dunia menjadi sesuatu yang sama sekali didesain baru, hasilnya adalah "Gatotkoco" N-250 berkapasitas 50-60 penumpang yang dikembangkan dengan teknologi *fly-by-wire* dari Airbus. Keempat, memproduksi pesawat terbang berdasarkan hasil riset kembali dari awal, yang diproyeksikan bernama N-2130 berkapasitas 130 penumpang dengan biaya pengembangan diperkirakan sekitar 2 milyar dolar AS.

Ketika pada 10 Agustus 1995 dia berhasil menerbangkan pesawat terbang N-250 *Gatotkoco* kelas *commuter* asli buatan dan desain putra-putra terbaik bangsa yang bergabung dalam PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN, kini menjadi PT Dirgantara Indonesia), dia diserang para pakar ekonomi bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah beras bukan "mainan mahal" seperti pesawat terbang.

Pemikiran ekonomi makro Habibie yang terkenal dengan *Habibienomics*, dihadirkan oleh lingkarannya sebagai *counter* terhadap pemikiran lain seperti *Widjojonomics*.³⁹ Ketika Habibie berhasil melakukan transaksi barter pesawat terbang CN-235 dengan beras ketan hitam dari Thailand, banyak pihak yang mengkritiknya. Buat apa repot-repot membangun industri pesawat terbang kalau hasil akhirnya hanya beras ketan? Kenapa tidak mengem-

³⁹ Ada yang mempercayai bahwa *Widjojonomics* sebetulnya adalah *Soehartonomics*, mengingat Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dan timnya besar andilnya dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto. Namun, pada tahun 90-an Soeharto mulai meningkatkan perhatiannya kepada industri mercusuar seperti pesawat terbang. Apakah saat itu merupakan ayunan pendulum dari penerapan pendekatan *Widjojonomics* (yang membawa stabilitas perekonomian dalam tiga dekade) menuju *Habibienomics* (pengembangan industri berbasis teknologi tinggi yang menyebabkan Indonesia harus banyak berutang ke luar negeri)?

bangkan sektor pertanian saja—yang hasilnya bisa ditukar dengan pesawat terbang?

Namun, empat tahapan alih teknologi yang dipercepat didefinisikan “bermula dari akhir dan berakhir di awal”, memang sukar dipahami pikiran awam. Habibie dianggap hanyut dengan angan-angan teknologinya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar industri dan teknologi Indonesia.

Yang mengherankan, rezim Orde Baru sangat memajukan program empat tahapan alih teknologi Habibie dengan menempatkan berbagai proyeknya sebagai industri strategis yang menyedot banyak dana. Satu di antaranya, yang paling spektakuler, adalah IPTN, yang sepanjang zaman disubsidi. Sehingga ketika perusahaan ini diposisikan sama seperti BUMN lainnya yang harus mampu membiayai dirinya, perusahaan yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia ini pun terancam ambruk dan terpaksa merumahkan dan mem-PHK 6000-an karyawannya. Lalu, dalam kesempatan deklarasi pendirian Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Habibie menyebutkan hancurnya IPTN adalah ulah IMF yang menghambat Pemerintah RI membantu pengembangan pesawat terbang dengan mencantumkan klausul pencabutan subsidi dalam *Letter of Intent* (LoI).

Sepak Terjang Politik

Sepak terjang Habibie di kancah politik diawali dengan manuvernya mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Dia kemudian didaulat menjadi Ketua Umum. Berdirinya ICMI dianggap sebagai titik pijak bangkitnya intelektual Islam dalam kancah politik praktis. Sebagai antitesa, berdiri pula Forum Demokrasi (Fordem) pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang populis dan egaliter serta inklusif. ICMI, yang dalam perja-

lanan selanjutnya praktis menjadi kekuatan politik Habibie, oleh Gus Dur dituding sektarian, karena itu kurang bagus untuk masa depan sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia.

Namun, *backing* politik Habibie yang terbesar tentu saja adalah Presiden Soeharto. Ia adalah anak emas sekaligus murid kesayangan Soeharto. Proyek-proyeknya selalu mendapat dukungan. Pada Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, B.J. Habibie dipercaya sebagai Wakil Presiden menggantikan Tri Sutrisno. Posisi Wapres pada saat kedudukan Presiden Soeharto mulai goyah digerogeti krisis ekonomi, merupakan jabatan yang sangat strategis.

Hingga akhirnya, "supir" kendaraan yang bernama RI ini tidak dapat melanjutkan tugasnya, dan Habibie menggantikannya.

Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demonstrasi. Demonstrasi itu mendesak Habibie merespons tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, kebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru. Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi.

Namun, "dosa" Habibie yang terbesar adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur, satu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah payah oleh rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Timor Timur, sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggul mutlak.

Dari sekian sepakterjang kontroversialnya, kasus lepasnya Timor Timur agaknya menjadi sesuatu “kesalahan” fatal seorang presiden yang sesungguhnya telah bersumpah dan berkewajiban mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesalahan ini mengakibatkan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999, Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. Penolakan ini jelas menciutkan nyali Habibie untuk terus maju sebagai kandidat calon presiden.

Setelah 17 bulan berkuasa, Habibie dipaksa pula *lengser* akibat referendum Timor Timur memilih merdeka. Ia pun pensiun dan kembali menjadi warganegara biasa. Dia memilih tinggal di Jerman, dan hingga kini masih memperoleh royalti atas delapan hak paten hasil temuannya sebagai ilmuwan konstruksi pesawat terbang seperti dari Airbus dan F-16.

Bagaimanapun, perjalanan hidup Habibie menunjukkan dia adalah sosok yang penuh kontroversi. Luasnya bidang tempat dia berkiprah membuktikan bahwa dia adalah sosok paling multidimensional di Indonesia. Begitu banyak dia memiliki kawan, dan nyaris begitu banyak pula orang yang tak setuju dengan sepak terjangnya. Maka, keputusannya bermukim di Jerman pun menuai kontroversi.

Mengapa Harus Tinggal di Jerman?

Istri adalah alasan utama Habibie tinggal di Jerman. Pendamping hidup sekaligus teman suka dan duka yang sudah dikenal sejak dia berumur 14 tahun, dr. Hasri Ainun Habibie. Putri keempat H. Mohammad Besari itu disebut terbaring menjalani perawatan di sebuah rumahsakit di Jerman. Habibie ingin selalu bisa mendampingi istri, dan harapannya istri juga akan selalu bisa mendampingi-

nya. Menurut tim dokter yang menanganinya, Hasri Ainun belum dibenarkan tinggal atau berkunjung ke daerah tropis karena kelembabannya tinggi. Karena itu, tim dokter merekomendasikan untuk tinggal di Jerman sampai sehat secara tuntas.

Kepergiannya untuk bermukim di Jerman dalam jangka lama, mengundang pertanyaan beberapa pihak tentang nasionalisme Habibie. Walaupun sesekali Habibie masih mau berkunjung ke negeri kelahirannya, tanah tumpah darahnya Indonesia, yang jauh dari tanah idamannya di Jerman. Namun sikap kontroversialnya tetaplah melekat sebab selalu saja berita kedatangannya menghebohkan. Sampai-sampai, ada yang menduga dia akan kembali ke arena politik di tanah air berebut kursi presiden dalam pemilihan berikutnya.

Habibie menyebutkan presiden itu bukan segala-galanya. Menurut status, jabatan, dan prestasi bukan alasan untuk berubah terhadap lingkungan. Itulah sebabnya, ketika sudah menjadi RI-1 sikap Habibie terhadap lingkungan tetap tidak berubah. Malah semakin menampakkan watak aslinya, misalnya tidak mau diam dan bergerak sesuka hati padahal sudah ada aturan protokoler yang harus dipatuhi. Pembawannya yang energik dan ekspresif, kadang-kadang memang membingungkan—karena jauh dari sosok pemimpin militer yang serba tegas dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya, ketika dia memegang puncak kekuasaan, namanya sering disingkat menjadi “Hari-hari Bikin Bingung”.

Mengapa Soeharto Bersikap “Aneh”?

Habibie sendiri berharap bukunya bisa memberi motivasi dan stimulus bagi pihak lain untuk menuliskan apa yang mereka ketahui dan alami pada detik-detik yang menentukan itu, agar membuka lebih banyak perspektif dan memperkaya penulisan sejarah Indonesia, khususnya pada masa reformasi.

Mantan Presiden B.J. Habibie memulai memoarnya dengan membuka catatan hariannya pada tanggal 20 Mei 1998. Ia kaget ketika pukul 10 malam menerima telepon dari sekretaris kabinet yang memberitahu bahwa Presiden Soeharto akan mundur dari jabatan esok harinya. Padahal, malam sebelumnya, ia bertemu Pak Harto di Cendana, membahas susunan kabinet baru yang sedianya diumumkan pada 23 Mei di Istana Negara, di depan pimpinan MPR/DPR. Rupanya, situasi itu berubah cepat. Pengunduran diri Pak Harto di luar rencana itu sendiri menyisakan pertanyaan di benak Habibie. Apa sebenarnya yang dikehendaki Pak Harto? Apakah ia diharapkan juga undur diri, mengingat pernyataan di depan sejumlah tokoh masyarakat pada 19 Mei, Pak Harto terkesan meragukan kemampuannya?

Yang pasti, tali silaturahmi dengan Pak Harto, orang yang dihormatinya itu, terputus sejak 21 Mei 1998. Hanya sekali komunikasi terjalin. Itu pun melalui telepon, yakni 8 Juni 1998 di hari ulang tahun ke-77 Pak Harto. Lewat berbagai jalur, ia berkali-kali berusaha menemui mantan orang nomor satu di Indonesia itu, tapi hasilnya nihil. Malah, ketika Pak Harto terserang *stroke* pertama, September 1999, dia tak diperkenankan menjenguk oleh para dokter yang merawat Pak Harto.

Mengenai hal itu, Habibie menulis dalam memoarnya, "... pertanyaan yang tetap tak terjawab sampai sekarang ini ialah, mengapa Pak Harto tidak bersedia bertemu atau berkomunikasi dengan saya sampai saat ini? Menghadapi kenyataan sikap Pak Harto yang seolah 'misterius' itu, saya yakin bahwa Pak Harto punya alasan tersendiri dan mungkin beranggapan sebaiknya biarlah saya tidak mengetahuinya."

Yang lebih menyakitkan, menurut Habibie, adalah sikap Pak Harto pada 21 Mei pagi. Ketika itu, ia telah dijanjikan bertemu.

Namun, saat ia tiba di istana, protokol telah mengagendakan pertemuan pertama Pak Harto dengan pejabat negara lain. Habibie kecewa. Tapi ia hanya bisa menunggu, meski merasa kecewa, terhina, dan merasa diperlakukan tidak adil. Karena lama tak dipanggil, ia memberanikan diri menuju Ruang Jepara. "Namun, baru saja saya berada di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka, lalu protokol mengumumkan presiden akan memasuki ruang upacara," tulisnya.

Namun, Pak Harto melewatinya begitu saja tanpa sapaan apa pun. Menurut Habibie, itu melecehkan keberadaannya di depan semua yang hadir. "Betapa sedih perasaan saya saat itu. Saya hanya melangkah ke ruang upacara mendampingi Presiden Soeharto, seseorang yang saya sangat hormati, cintai, dan kagumi, yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada," tulis dia lagi.

Munculnya "jurang" antara Soeharto dan Habibie (yang sering mengaku sebagai muridnya), memang jarang diketahui publik. Wacana yang berkembang pada saat itu justru menganggap Habibie adalah sosok yang ditunjuk Soeharto untuk melindungi dirinya. Habibie adalah penguasa yang cocok agar Soeharto tidak diadili dan kebobrokan Orde Baru tidak dipermasalahakan hingga sidang pengadilan. Ya, Habibie justru dianggap sebagai kepanjangan tangan Soeharto.

Mungkin Soeharto mengira Habibie mendalangi pengunduran diri Menko Ekuin dan 14 menteri bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Pernyataan Ginandjar dkk merupakan pukulan berat bagi Soeharto. Sebab, kalau memang ia ingin membuat *new deal* untuk mengatasi krisis dengan cara membentuk Kabinet Reformasi, Soeharto memerlukan mereka. Mustahil dia membentuk tim ekonomi yang kuat tanpa dukungan Ginandjar cs.

Hal lain yang mungkin membuat Presiden Soeharto tidak berkesan adalah apa yang terjadi di Kuningan pada saat itu. Pada ma-

lam hari tanggal 20 Mei 1998, Habibie mengadakan sidang kabinet *ad hoc* di kediamannya, Jalan Kuningan, yang menghadirkan empat orang Menko dan 14 menteri. Dalam memoarnya, Habibie tidak menyebutkan bahwa sidang itu dilaksanakan atas perintah Presiden Soeharto. Lagipula, sidang tersebut menghadirkan menteri-menteri yang sudah “membelot” atau menarik dukungannya terhadap Soeharto.

Pada malam itu juga, Soeharto membuat keputusan penting. Ia mempercepat rencana pengunduran dirinya dari semula pada hari Sabtu 23 Mei 1998 menjadi Kamis 21 Mei 1998. Malam itu juga, ia melalui Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid memberitahukan kepada Habibie. Selanjutnya, Soeharto bertemu dengan Pangab Wiranto yang didampingi Subagyo Endriartono Sutarto.

Yang jelas, Habibie sudah mengungkapkan tanda-tanda adanya “perang dingin” antara dirinya dan Soeharto. Namun mantan Presiden Soeharto sendiri tidak pernah—atau belum—mengungkapkan *statement* mengenai hal yang sama.

Bab 3

Benarkah Ada Kudeta?

Prabowo Subianto adalah sosok yang paling menarik perhatian dalam sejarah TNI pada dekade 90-an. Meraih tiga bintang pada usia 46 tahun, ia memecahkan rekor jenderal termuda dalam TNI modern. Karirnya sangat berkilau. Nama Prabowo mulai diperhitungkan sejak menjabat Komandan Jenderal Kopassus (1996-1998) dan memelopori pemekaran satuan baret merah ini. Bulan Januari 1998 ia dilantik menjadi Panglima Kostrad—jabatan prestisius dalam struktur militer.⁴⁰

Namun bulan Mei 1998, petaka menimpa dirinya. Tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri,

⁴⁰ Sebelum 1965, jabatan Pangkostrad agak marginal dalam struktur kemiliteran. Namun, setelah Pangkostrad Mayjen Soeharto berhasil membasmi Gerakan 30 September dan memberantas komunisme, jabatan ini naik gengsinya. Dalam era Orde Baru, siapa yang menjabat Pangkostrad adalah yang paling berpeluang dipromosikan menjadi Kepala Staf AD dan kemudian Panglima ABRI.

Letjen Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya. Ia dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf Komando ABRI, sebelum akhirnya pensiun dini dengan pangkat Letjen.

Kontroversi Habibie-Prabowo bermula sehari setelah Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Dalam suasana kemelut di sepanjang hari itu, Habibie harus menyusun kabinet baru serta menata ulang pimpinan ABRI menyusul ambruknya Kabinet Pembangunan VII. Malam hari setelah pelantikan, Presiden B.J. Habibie bekerja keras menyusun kabinet. Namun untuk posisi yang sangat krusial, yaitu Menhankam/Pangab, belum juga ditentukan hingga rapat ditutup pukul 01.45 dinihari.

Jumat pukul 06.10 Presiden Habibie menelepon Jenderal Wiranto, meminta dia tetap sebagai Panglima ABRI. Wiranto menyatakan sanggup. Pukul 07.30 Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zen dan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Muchdi PR menemui Habibie membawa surat dari Jenderal (Purn) Nasution. Isinya, saran agar KSAD Jenderal Subagyo HS diangkat menjadi Panglima ABRI dan Prabowo sebagai KSAD.

Tiga jam kemudian, Jenderal Wiranto menemui Presiden Habibie untuk melaporkan adanya gerakan pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar Istana Merdeka dan Kuningan, tempat kediaman Habibie, tanpa koordinasi dengan Markas Besar ABRI. Presiden Habibie menginstruksikan untuk mengganti Pangkostrad hari itu juga, sebelum matahari terbenam.

Siapa Prabowo?

Sebagian besar dari kontroversi yang menimpa Prabowo, tampaknya berkaitan dengan posisinya sebagai bagian dari keluarga Cendana. Ia menikahi Siti Hedyati, putri Presiden Soeharto, pada

bulan Mei 1983.⁴¹ Bertindak selaku saksi pernikahan adalah Jenderal M. Jusuf.⁴²

Sejak menjadi bagian dari *first family*, karir Prabowo lebih diperhatikan—baik oleh pihak yang pro kepadanya, juga pihak yang kontra. Pada saat ia menjadi perwira menengah di dekade 80-an, situasi di tubuh AD dihiasi polarisasi antara mereka yang memihak kepada Jenderal L.B. Moerdani dan Jenderal M. Jusuf. Polarisasi ini cukup tajam dan terbawa hingga dekade berikutnya. Prabowo termasuk perwira yang lebih dekat ke pihak M. Jusuf.

Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 sebagai anak ketiga dari keluarga Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Ny. Dora Sigar. Sejak kecil ia menunjukkan bakat dan kepintarannya. Ia menamatkan sekolah menengahnya di London pada usia 16 tahun. Menurut Sumitro, “Karena ia terlalu ‘rewel’ di kelasnya, maka ia ‘dihukum’ dinaikkan kelasnya supaya menyadari bahwa ada orang lain yang juga pintar.”⁴³

Di usia yang sangat muda itu, Prabowo diterima kuliah di Universitas Colorado, AS. Namun ini justru merisaukan Sumitro. Merasa kuliah di usia terlalu muda tidak baik secara psikologis bagi putranya, maka Sumitro membawa Prabowo pulang ke tanah air. Sumitro meminta anaknya menunda hasratnya untuk kuliah.

Setelah beberapa waktu tinggal di Indonesia, Prabowo mengubah rencananya. Ia tidak lagi berminat kuliah di Amerika. Dia ingin

⁴¹ Ada selentingan bahwa pengenalan Prabowo dan Siti Hedyati diprakarsai oleh Wismoyo, ipar Soeharto (kelak menjadi KSAD). Saat itu Wismoyo menjadi komandan Prabowo (lihat Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, Sinar Harapan, 2000, hlm. 416)

⁴² Salah satu jenderal favorit Soeharto. M. Jusuf adalah satu dari tiga jenderal yang membawa naskah asli Supersemar dari Istana Bogor, 11 Maret 1966 malam hari—bersama Basuki Rachmat dan Amirmachmud. Ketika Prabowo menikah, M. Jusuf menjabat Menhankam/Pangab.

⁴³ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 413

melanjutkan pendidikannya di AKABRI. Dengan sponsor Jenderal Sutopo Juwono, dia pun masuk Magelang. Namun, karena bahasa Indonesianya masih kagok dan ia adalah anak Menteri,⁴⁴ Prabowo kerap menjadi “mangsa”.

Prabowo menamatkan Akademi Militer tahun 1974, lebih muda setahun dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi Presiden RI. Karir militer Prabowo lebih banyak dihabiskan di pasukan elit—Kopasandha atau Kopassus. Pada kurun waktu 1982-1985 Mayor Prabowo Subianto bertugas sebagai staf khusus Jenderal L.B. Moerdani.⁴⁵

Periode 1993-1998, karir militer Prabowo naik pesat. Sebagai *the rising star*, ia meroket dari perwira menengah menjadi Letjen! Melesatnya karir Prabowo terjadi pada saat kepemimpinan ABRI

⁴⁴ Pada tahun 1967 Sumitro Djojohadikusumo kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri pasca pemberontakan PRRI/Permesta—di mana Sumitro menaruh simpatinya. Sumitro dimusuhi oleh rezim Soekarno. Setelah Soekarno ditumbangkan oleh Orde Baru, Sumitro pun kembali ke tanah air. Pada tahun 1968 ia menjadi anggota Tim Penasihat Ekonomi Presiden. Dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973) ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan RI. Dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978) ia menjadi Menteri Negara Riset RI. Pada tahun 1953, Sumitro pernah menjadi salah seorang anggota dari *Group of Five Top Experts* (Lima Ahli Dunia) yang membantu Sekjen PBB Dag Hammarskjold dalam menyusun laporan-laporan tentang *Commodity Trade and Economic Development*.

⁴⁵ Menurut Kivlan Zen, Mayor Prabowo mendapat penjelasan tentang rencana menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Prabowo memperoleh informasi ini karena Jenderal Moerdani melihat latar belakang ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, seorang sosialis, dan ibunya seorang penganut Kristen asal Manado. Mayor Prabowo merasa tidak cocok dengan rencana tersebut dan melaporkan langkah-langkah Jenderal Moerdani kepada mertuanya, Presiden Soeharto—termasuk rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menguasai Indonesia atau menjadi Presiden RI (Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI AD*, 2004, hlm. 70). Itulah yang menjadi bibit awal perseteruan antara Prabowo, yang lebih dekat secara psikologis dengan Jenderal M. Jusuf, dan perwira-perwira binaan Jenderal Benny Moerdani.

dijabat Jenderal Feisal Tanjung dan Jenderal R. Hartono—dua perwira tinggi yang dijuluki “jenderal santri”. Meroketnya Prabowo juga seiring sejalan dengan bintang politik Habibie yang kian bersinar setelah ia mendirikan dan memimpin ICMI.

Hubungan Prabowo dan putra-putri Soeharto tidak berjalan mulus. Bahkan telah lama Prabowo memiliki hubungan yang dingin, bahkan boleh dibilang tegang, dengan Bambang, Tutut, Mamiék, dan Tommy. Menurut Sumitro, “Semua anak Soeharto mendendam kepada Bowo. Cuma Sigit yang sedikit netral.”⁴⁶

Prabowo terutama amat khawatir dengan sepak terjang bisnis anak-anak Presiden. Ia pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran *markup*-nya mencapai empat kali lipat dari harga sebenarnya. Menurut Sumitro, Prabowo dengan ketus menyebut itu sebagai penjarahan.⁴⁷ Dan ketika Tutut mendominasi penyusunan kabinet dan anggota MPR/DPR 1997, Prabowo juga bereaksi keras, “Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan?” protesnya. Dan, setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu kepada ayahandanya tercinta: Presiden Soeharto.

Puncaknya terjadi di bulan Mei 1998. Keluarga Cendana marah mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan sang raja. Tutut dan Mamiék marah-marah kepada Prabowo, “Kamu ke mana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR?” Prabowo dengan sengit bertanya apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu!⁴⁸

⁴⁶ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 426

⁴⁷ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 426

Rumor Kudeta

Kamis, 21 Mei 1998, tiba-tiba Jakarta menjadi senyap. Dari tiga juta kendaraan yang biasa melintasi jalanan ibukota, kini tinggal satu atau dua saja. Patroli pasukan bersenjata lengkap hilir mudik, bukan hanya di jalan-jalan protokol, tetapi hingga jalan-jalan tikus. Tank dan panzer bersiaga di setiap sudut. Banyak pasukan yang didatangkan dari luar Jakarta untuk mengamankan ibukota yang sedang panas dilanda kerusuhan maupun krisis politik.

Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) mengerahkan pasukan dari Garut dan Tasikmalaya, Malang, dan Makassar. Menurut Kepala Staf Kostrad pada saat itu, Mayjen Kivlan Zen, dua per tiga kekuatan pasukannya ada di Jakarta.⁴⁹ Itu berarti setara dengan 178 kompi atau 17.000 tentara.

Padahal, masih ada kesatuan-kesatuan lain yang juga mengerahkan pasukannya untuk mengamankan ibukota. Ada Kopassus (Komando Pasukan Khusus), Paskhas (Pasukan Khas AU), serta Marinir.⁵⁰ Mereka telah bergegas menuju Jakarta setelah ibukota dilanda kerusuhan di hari pertama, 13 Mei 1998.

Kawasan Monas merupakan wilayah dengan penjagaan yang paling ketat. Barikade dan kawat berduri menjuntai di segala arah jalan yang menuju kawasan tersebut.⁵¹ Tidak mengherankan, sebab

⁴⁸ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 427

⁴⁹ Lihat majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 34

⁵⁰ Saat itu Marinir merupakan kesatuan yang paling mendapat simpati warga masyarakat, karena tindakan persuasi mereka yang dapat diterima masyarakat awam.

⁵¹ Saat itu beragam rumor berembus. Misalnya isu yang mengatakan ada musuh yang akan menyerbu Indonesia dari arah Teluk Jakarta. Juga ada kabar, pasukan asing dengan kapal induknya telah bersiaga menyerang. Sejatinya, kehadiran kapal asing di perairan sebelah utara Jakarta merupakan persiapan pemerintahan asing untuk mengevakuasi warganya.

kawasan itu merupakan sentral dari pemerintahan. Berbagai kantor departemen pemerintahan dan kedutaan besar asing berkumpul di wilayah itu. Monas juga merupakan “halaman belakang” istana—tempat paling rawan kemungkinan adanya tusukan musuh yang ingin menduduki Istana.

Apalagi, beberapa hari menjelang 20 Mei 1998, berembus kabar tentang adanya *people power* atau aksi sejuta massa yang digalang oleh gerakan mahasiswa untuk mendesak agar Soeharto mundur. Momen aksi sejuta massa itu bertepatan dengan peringatan 90 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan, kabarnya, Amien Rais akan datang turut menggalang aksi yang pada awalnya dirintis oleh jaringan gerakan mahasiswa ibukota itu.⁵²

Begitu meruncingnya situasi menjelang tanggal 20 Mei 1998. Pihak demonstran bersikeras akan tetap melaksanakan aksinya kendati pengamanan oleh aparat tampak begitu ketat. Di sisi lain, pihak militer juga bersikeras menggunakan kebijakan represif untuk mengendalikan jumlah demonstran yang massif. Konon sempat muncul perintah untuk menembak kaum demonstran dengan peluru tajam, apabila mereka bertindak anarkis.

Negosiasi demi negosiasi berlangsung, dan pada dinihari 20 Mei 1998, Amien Rais menghimbau mahasiswa untuk membatalkan aksi yang riskan itu. Sebab tidak ada jaminan keamanan. Sangat mungkin, akan terjadi pertumpahan darah dalam peristiwa itu—seandainya jadi diselenggarakan.

Konsentrasi pasukan di Monas khususnya tanggal 19-21 Mei 1998 mengingatkan publik pada manuver Kostrad pada tanggal 1

⁵² Amien Rais pada saat itu merupakan *icon* perubahan politik yang dengan keras menuntut reformasi. Presiden Soeharto tidak menyukai tokoh ini. Terbukti, pada tanggal 20 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog, nama Amien Rais tidak tercantum dalam daftar tamunya.

Oktober 1965. Kebetulan, Pangkostrad 1965 adalah Mayjen Soeharto, dan Pangkostrad Mei 1998 adalah Letjen Prabowo—menantunya. Jadi, rumor kudeta pun muncul, sama simpang-siurnya dengan isu penyerbuan pasukan asing dari Teluk Jakarta.

Prabowo: “Tidak Ada Kudeta”

Menjelaskan pertanyaan tentang konsentrasi pasukan Kostrad di Monas, Prabowo menjawab: “Semua pengerahan pasukan ada di bawah komando operasi, Kodam Jaya, Pasukan Marinir, Pas-khas, Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, Kostrad, Kopassus—waktu itu dipegang Panglima Kodam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Tujuannya mengamankan ibukota yang beberapa hari terbakar. Aparat ingin mengembalikan rasa aman karena terjadi pelarian modal.⁵³ Kudeta adalah tuduhan yang kejam terhadap prajurit.”⁵⁴

Prabowo menolak jika dikatakan ada pergerakan pasukan Kostrad di luar komando. “Seandainya ada, terus untuk apa?” katanya. “Apa mau kudeta? Kalau saya punya niat, saya panglima 34 batalyon. Kenapa tidak saya lakukan? Letkol Untung⁵⁵ yang hanya punya dua batalyon saja bisa melakukan G30S/PKI. Jadi, tergantung individu-nya.”⁵⁶

Kivlan Zein mengaku heran dengan kabar yang disampaikan Wiranto bahwa ada pergerakan pasukan Kostrad yang tidak diketa-

⁵³ Pelarian modal (*capital flight*) adalah faktor utama turunnya nilai rupiah. Pelarian modal dipicu oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi keamanan serta kepastian hukum.

⁵⁴ Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam”, wawancara dalam majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 32

⁵⁵ Ketika memimpin Gerakan 30 September, Letkol Inf. Untung adalah Komandan Batalyon I Cakrabirawa, pasukan pengamanan Presiden pada masa itu. Akses Letjen Prabowo selaku Pangkostrad terhadap pasukan yang siap tempur, jelas lebih besar dibandingkan Letkol Untung.

⁵⁶ Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam”, wawancara dalam majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 32

hui Pangab. Ia memastikan Wiranto mengetahui pergerakan pasukannya. Menurut Kivlan, pola pengamanan itu sesuai dengan yang ditetapkan Markas Besar ABRI dalam rencana operasi pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998—yang disahkan sendiri oleh Wiranto.⁵⁷

Lagipula, menurut Kivlan, “Ketika itu semua di bawah kendali Panglima Komando Operasi, Sjafrie.” Dan perintah yang diterimanya dari Pangkostrad adalah menyiapkan pasukan, berapa pun yang diminta Sjafrie Sjamsoeddin.⁵⁸

Pola pengamanan itu adalah sebagai berikut:

- ❖ Kostrad menjaga instalasi vital di seluruh Jakarta dan sekitarnya
- ❖ Paskhas dan Marinir mengamankan kantor-kantor diplomatik negara asing yang ada di Jakarta
- ❖ Kopassus bertugas mengamankan Istana dan kediaman Presiden⁵⁹

Pada malam hari 21 Mei 1998, ketika Presiden B.J. Habibie sedang menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan, Letjen Prabowo mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. “Waktu itu situasi tegang. Banyak orang tidak ingin Habibie menggantikan Soeharto. Menurut saya dan teman-teman, harus ada pergantian konstitusional. Saya bertemu 44 pemimpin ormas Islam di Jalan Suwiryo 6

⁵⁷ lihat majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 34

⁵⁸ lihat majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 34

⁵⁹ Danjen Kopassus (saat itu) Mayjen Muchdi P.R. mengungkapkan, sesuai dengan prosedur, Ring 1 pengamanan kediaman Presiden tetap dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (dengan kekuatan 1 kompi dilengkapi panzer). Kopassus yang berkekuatan 200 orang bertugas mengamankan ring luar. Sedangkan pasukan cadangan ditempatkan di Senayan, Monas, dan Halim Perdanakusumah (lihat majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 34-35)

Menteng pada 21 Mei 1998 malam. Saksinya masih hidup. Lalu, saya bawa mereka kepada Pak Habibie, pukul 23.00 WIB. Kok, tiba-tiba besoknya saya dituduh menggerakkan pasukan untuk mengepung.”⁶⁰

Letjen Prabowo menolak keras prasangka kudeta yang sempat beredar di masyarakat. Menurut dugaannya, semua itu hanya pergantian jabatan dalam militer yang dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa. “Ini kalkulasi politik saya. Saya ini bagian dari Cendana. Itu intuisi saya melihat sejarah. Mungkin, beliau (Habibie) menilai tidak baik secara politik. Yang saya sesalkan, mestinya tidak usah ada alasan. Begini saja, Anda saya berhentikan.”⁶¹

Prabowo kepada berbagai media massa juga menyatakan penolakannya terhadap detail dialog yang diuraikan Habibie dalam buku *Detik-Detik yang Menentukan* (halaman 102). Tidak ada kata-kata keras seperti “Anda ini Presiden apa? Anda naif!” apalagi diungkapkan dengan penuh emosi. “Saya tidak tahu dapat darimana kata-kata itu. Padahal, pertemuan itu tidak seperti ini,” ujarnya.⁶²

Dalam pertemuan itu, Prabowo hanya mempertanyakan mengapa pergantian Pangkostrad dilakukan tidak dengan semestinya melalui sebuah upacara formal di depan pasukan. “Pergantian itu harus ada memorandum serah terima jabatan dan harus ada verifikasi serta dilakukan di depan pasukan. Ini untuk menghindari adanya dugaan-dugaan yang tidak benar.”

⁶⁰ Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam”, wawancara dalam majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 32

⁶¹ Prabowo Subianto: “Itu Tuduhan Kejam”, wawancara dalam majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 32

⁶² “Detik-Detik Pertemuan Prabowo-Habibie”, *Suara Merdeka*, 2 Oktober 2006

Atas Permintaan Soeharto?

Pada tahun 2004, Prabowo sempat bertemu dengan Habibie di Hamburg, pada sebuah restoran saat santap siang di rumahnya. Seusai makan siang itulah, Prabowo berkesempatan berbincang dengan Habibie hingga larut malam. “Akan tetapi anehnya, justru Habibielah yang terlihat emosional, dan beliau justru menantang saya untuk membahas dahulu semua permasalahan yang berkaitan dengan pencopotan itu. Padahal, saya sebelumnya sudah menganggap masalah itu *clear* dan tidak ada kudeta. Nah, di situlah saya mengetahui, pencopotan saya secara tidak terhormat itu karena ada permintaan dari *superpower*,” paparnya.⁶³

Prabowo saat itu kaget dan tidak bisa menjawab. Dia pun mengaku tidak meminta konfirmasi kepada mertuanya itu. “Yang jelas, saat itu saya hanya menerimanya saja dan tidak ada pertanyaan lagi,” ucapnya.

Menurut Prabowo kedatangannya menemui Habibie untuk menanyakan pergantian dirinya sebagai Pangkostrad. Saat itu, kata Prabowo, Habibie mengatakan, “Itu atas permintaan mertua Anda (Soeharto).” Tapi Prabowo merasa ini keputusan presiden yang sah. Dan karena itu dia kembali meminta kepada Pak Habibie agar penggantian itu tidak menimbulkan image *buruk* di masyarakat.⁶⁴

Di hari-hari terakhir kekuasaannya, Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama Habibie sedang menggaglang persekongkolan untuk menumbangkan dirinya. Sebagaimana riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur

⁶³ “Detik-Detik Pertemuan Prabowo-Habibie”, *Suara Merdeka*, 2 Oktober 2006

⁶⁴ “Prabowo Membantah Habibie”, *Republika*, 29 September 2006

siasat untuk mendongkel sang raja. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas dan menjadi bahan pergunjingan di masyarakat sejak awal 1998—ketika Prabowo diangkat menjadi Pangkostrad. Menurut Sumitro, dalam hal ini rupanya Soeharto termakan isu yang diembuskan putra-putrinya sendiri—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang kian memburuk dengan Prabowo.⁶⁵

Nasib Prabowo Selanjutnya

“Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di mana pun,” ungkap Sumitro dalam sebuah wawancara dengan media asing.⁶⁶

Salah satu yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo, menurut Prof. Sumitro, adalah Pangab Jenderal Wiranto.⁶⁷ Bersama kelompoknya, Jenderal Wiranto niscaya dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo.

Kabarnya, Wiranto di sekitar 21 Mei 1998 mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad.” Wiranto konon bertanya, apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “*Ndak usah,*

⁶⁵ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 428

⁶⁶ *The Business Times*, edisi 15-16 Februari 1997

⁶⁷ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 429

kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual?" sergah Soeharto—tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.

Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon ayah-andanya memberitahukan bahwa ia akan disingkirkan. "Saya dikhianati," kata Prabowo. Oleh siapa? "Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan," tambah Prabowo.⁶⁸ Prabowo tentu saja kecewa. Dia menulis surat kepada Soeharto. Namun surat itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.

Tanggal 25 Mei 1998 Letjen Prabowo Subianto secara resmi dicopot dari jabatan Pangkostrad. Dia dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), karir militer Prabowo bahkan diakhiri. Prabowo dipensiunkan secara dini.

Tindakan pertama ABRI pasca *lengser*-nya Soeharto adalah berusaha mengungkap kasus penculikan para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan.⁶⁹ DKP dibentuk. Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan

⁶⁸ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 429

⁶⁹ Langkah itu dinilai sebagai sinyal positif reformasi ABRI dalam kehidupan demokrasi. Pengamat politik Indonesia sekaliber Daniel S. Lev dan Harold Crouch pun memujinya. Namun menurut Sumitro, pujian tersebut terlalu prematur mengingat latar belakang yang lebih bernuansa politis. "Jatuhnya vonis hukuman buat anggota tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik... Maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap, maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal, atau membuka rahasia di Angkatan Darat sendiri ... (Lihat biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, Sinar Harapan, 2000, hlm. 432-436). Dengan demikian Wiranto memiliki dua keuntungan: *pertama*, menyingkirkan Prabowo, pesaingnya dalam memperebutkan jabatan-jabatan strategis di tubuh militer; *kedua*, menaikkan citra TNI yang telah direformasi.

Kolonel Chairawan diberhentikan dengan hormat dari jajaran ABRI, atau diakhiri masa dinasny.

Namun anehnya, setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawan, pengusutan kasus penculikan otomatis terhenti. Sumitro dalam biografinya mempertanyakan, bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer?

Setelah menerima vonis DKP, Prabowo akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baru. Dia memilih menjadi pengusaha di luar negeri. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal Wiranto, yang berkomentar singkat, "Ya, sudah pergi saja ke luar, tidak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!"⁷⁰

Punya Andil

Prabowo dkk merasa, naiknya Habibie menjadi Wapres pada bulan Maret 1998 (yang menjadi "jalan tol" untuk menuju kursi kepresidenan), merupakan andilnya. Kivlan Zen dan Prabowo, pada tahun 1988 terlibat dalam gerakan yang menolak Jenderal L.B. Moerdani untuk maju sebagai wakil presiden. Sejak awal dekade 90-an, sebagai antitesis terhadap kekuatan Moerdani cs., Prabowo dan kawan-kawan aktif untuk menjalin hubungan dengan perwira tinggi maupun politisi sipil yang dianggap sebagai kandidat yang pas. B.J. Habibie, sebagai pendiri dan ketua ICMI, dianggap sebagai figur yang cocok untuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Saat yang dianggap tepat adalah tahun 1998.

Itulah sebabnya, ketika buku Habibie diluncurkan dan secara tersirat menyatakan kecemasan adanya kudeta yang dilakukan oleh

⁷⁰ Biografi Sumitro Djojohadikusumo, *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (Sinar Harapan, 2000), hlm. 430

Prabowo dkk, Mayjen (Purn) Kivlan Zen merasa gusar. "Saya kupas nanti bagaimana Habibie bisa menjadi wapres, kemudian menjadi presiden, supaya dia tahu kita *back up* dia. Agar kita tahu mengapa dia mengambil keputusan seperti itu terhadap kita dan Prabowo yang mendukung dia. Tetapi, mengapa Habibie tak berdaya membela kita. Kalau tak berdaya membela kita, janganlah pula kita ditendang begitu," kata Kivlan dalam Diskusi *Kontroversi Mei 98* di Institute for Policy Studies, Jalan Penjernihan IV No 8, Jakarta; Selasa 3 Oktober 2006.

Menurut Kivlan, peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie merupakan pertarungan kanan dan kiri. "Yang kiri itu Kristen, yang kanan Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis kubu Benny dan Pak Harto," ujar Kivlan. Kivlan saat itu ada di blok kanan bersama perwira muda lain, termasuk Prabowo. "Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti-Islam, paling tidak netral. Maka berkumpul para perwira yang eks Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Prabowo ikut saya. Kemudian Adityawarman, Sjafrie Sjamsoeddin, Muchdi P.R., dan Syamsul Maarif. Kami perwira muda dari Akabri 70 ke atas."⁷¹

Pada 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. "Prabowo yang sakit hati ketemu saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny," ujar dia.

Gerakan penolakan gerakan Benny terus berjalan hingga 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny? "Kami naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu asisten operasi Timor Timur dan batalion yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya

⁷¹ "Buku Habibie: Mantan Perwira Muda Merasa Disingkirkan" (*Lampung Post*, 5 Oktober 2006)

Prabowo bisa sukses? Kami kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap. Pak Wiranto diusulkan Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto,” kata dia.

Namun, Kivlan dan Prabowo melihat Wiranto justru makin dekat dengan Benny. Akhirnya, mereka mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny. Dapatlah nama Z.A. Maulani, yang rencananya diusahakan sebagai KSAD lebih dulu. Tetapi, Z.A. Maulani tidak berani. “Lantas, kami cari yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut, ‘Masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima)’. Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny kami angkat,” ujar Kivlan.

Kivlan menceritakan pada 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas Kivlan dan Prabowo dkk. di Restoran Rindu Alam, tanggal 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo, *ed*), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR 1 Maret 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.

“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo.

“Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalion, Ismet satu batalion, Sjafrie satu batalion, kau satu batalion. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.

Tidak lama kemudian, terbukti semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang, ‘Biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk’. Itu laporan saya karena dia mau kudeta. Pada 1989, Benny pun diberhentikan,” kata Kivlan.

Pada Januari 1989, Kivlan dkk. berencana mempertemukan Feisal dan Habibie. Pada 28 Januari 1989, tujuh perwira terbang ke Bandung malam-malam untuk menemui Habibie. Habibie yang saat itu masih menjabat Menristek menerima mereka. "Kami sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal yang dimajukan. Kami mengatakan hal itu agar Feisal diangkat," kata dia.

Setelah itu, Kivlan dkk. mempertemukan Habibie dan Feisal di Seskoad pada 1989. Tetapi, setelah pertemuan itu hingga 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal punya peluang diangkat sebagai panglima ABRI. Akhirnya, Feisal pun menanyakan hal itu kepada Habibie.

"Nah, pada 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kami mengajukan Feisal sebagai ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sintong sakit hati," ujar dia.

Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar Feisal bisa naik menjadi panglima. Pada 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat peresmian Stasiun Gambir. "Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui Feisal akan naik. Pukul 9.00 dia dilantik menjadi letnan jenderal, dilantiklah dia jadi bintang tiga. Kemudian, pada 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI," ujar dia.

Upaya menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan panglima ABRI masih dirangkap Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat KSAD dan Menhankam. "Tetapi, itulah pintarnya Pak Harto. Pada 15 Juni, diangkatlah Feisal sebagai

panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan ke Wismoyo Arismunandar,” ujar dia. Setelah itu hubungan Feisal dan Habibie semakin dekat.

Pada Januari 1998, ada pertemuan tokoh masyarakat dan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden. “Reaksi Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” ujar dia. Akhirnya, pada 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden. “Saya sampaikan di kantor Habibie pada 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden karena dirancang perwira-perwira muda ini,” ujarnya.

Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie melupakan para perwira muda. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda. Pengangkatan Feisal kami rancang untuk menghadang Benny karena Benny sejak 1988 ingin jadi wakil presiden, tapi terus kami gagalkan,” ujarnya.

Pengerahan Pasukan Kostrad

Kivlan Zein juga menceritakan panjang lebar pengerahan pasukan Kostrad di sekitar Monas, Istana, dan kediaman B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan, saat detik-detik kejatuhan Presiden Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai presiden.

Pengerahan pasukan Kostrad ini memang inisiatif Prabowo. “Sejak ada kerusuhan 12 Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Prabowo berpikir situasi sudah membahayakan karena terjadi revolusi. Prabowo memanggil saya. Saya saat itu sedang terkenal flu dan datanglah saya ke Kostrad pukul 12 malam. ‘Siapkan pasukan’, kata Prabowo,” ujar Kivlan.

Prabowo saat itu memerintah Kivlan karena dia merupakan anak buah Prabowo. Kivlan menjabat Kepala Staf Kostrad (Kas-kostrad) dan berpangkat Mayjen. "Urusan logistik, urusan intelijen, penyiapan pasukan, dan perintah komando adalah memang urusan kepala staf. Saya pun siapkan rencana operasi," kata dia.

Saat itu, perintah operasi sejak Pemilu 1997 hingga diadakannya SU MPR belum dicabut. Sebab itu, semua pasukan yang berada di kodam tetap disiagakan. "Polisi di-BKO-kan ke kodam, Marinir, Paskhas di-BKO-kan. Jadi, sudah tidak perlu lagi izin Mabes ABRI. Kodam yang minta," ujar Kivlan.

Kostrad dapat pasukan dari mana? Sangat banyak. Ada dari Makostrad, Yon 328, Yon Arnudri Serpong, Yon 305, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Pasukan masih kurang, kami minta datangkan dari Makassar. Saya sendiri yang datang untuk meyakinkan. Kami tidak dikasih Hercules oleh Mabes ABRI. Akhirnya, Kostrad carter Mandala dan Garuda untuk mendatangkan pasukan," kata dia.

Pada 14 Mei 1998, Kivlan mengaku ditelepon Kasum ABRI, Letjen Fachrul Rozi. "Eh, jangan kau kerahkan pasukan. Ini permintaan Pangab (Wiranto). Keadaan kacau, Jakarta bakar-bakaran," kata Fachrul Rozi kepada Kivlan. Namun, Kivlan tetap pantang mundur karena Kodam Jaya minta penambahan pasukan.

Pada 14 Mei 1998 itu, kata Kivlan, Wiranto malah pergi meresmikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Malang. "Seharusnya dalam keadaan kacau, tak perlu Pangab ke sana untuk meresmikan PPRC. Cukup Kasum. Sudah saya sarankan, sudah saya tulis. Keadaan kacau, jangan tinggalkan Jakarta," ujar Kivlan. Berdasarkan strategi perang, kata Kivlan, untuk mengendalikan keadaan dan memengaruhi keadaan, pertama yang paling penting adalah kehadiran komandan di tengah pasukan. Faktor penting

kedua adalah dukungan logistik. “Mengapa kok komandan malah meninggalkan Jakarta?” ujar Kivlan.

Di kubu Prabowo dan Kivlan, memang sudah disimpulkan dengan telak bahwa Jenderal Wiranto gagal mengatasi situasi. Dengan demikian, mereka sudah bersiap-siap mencari figur lain yang cocok sebagai Panglima ABRI. Selain itu, juga ada kekhawatiran kalau Wiranto tetap menjadi Pangab, karir militer mereka sangat terancam.

Menolak Wiranto

Kivlan dkk. memang tidak setuju dengan rencana Habibie yang ingin mempertahankan Wiranto sebagai panglima ABRI. Mereka sudah menganggap Wiranto gagal pada tanggal 12 Mei 1998, sehingga tidak layak lagi menduduki posisi Panglima ABRI. Mereka menghendaki Jenderal Wiranto tetap sebagai Menhankam, tetapi untuk posisi Panglima ABRI harus dicari figur lain. Orang yang tepat menurut mereka adalah Jenderal Subagyo HS yang saat itu menjabat KSAD.

Pada 21 Mei 1998 malam, Kivlan bertemu Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo bertanya ke Kivlan mengapa bukan Subagyo yang menjadi panglima ABRI, *lha* kok masih Wiranto. “Bagaimana ini Bang, tanya Prabowo pada saya. Berpikir-lah saya. Yang bisa *ngomong* ke Habibie soal ini hanya satu, Pak Nas,” ujar Kivlan. Maka berangkatlah Kivlan berangkat menuju rumah Nasution.

“Pada 22 Mei, pukul 06.00 WIB, berangkatlah saya dari markas Kostrad. Saya telepon lebih dulu, dan ternyata Pak Nas sedang sakit. Saat bertemu, Pak Nas duduk dan meminta saya menulis dan dia akan menandatangani surat itu,” kata Kivlan. Lantas Kivlan membuat draf surat yang intinya merekomendasikan Subagyo agar

dinaikkan sebagai Pangab dan Prabowo sebagai KSAD. Surat yang dibuat Kivlan itu pun ditandatangani Nasution.

Setelah itu, sepulang dari rumah Pak Nas, Kivlan Zen mencari Muchdi P.R. di kantornya untuk diajak menemui Habibie mengantarkan surat dari Nasution itu. "Di kantornya, saya tidak bertemu. Tetapi, akhirnya Pak Muchdi menyusul saya di ruang tamu Istana," ujar dia. Jadi awalnya, Kivlan mendatangi Habibie sendirian. Di Istana, Kivlan diterima ajudan Presiden Habibie, Kolonel Tubagus Hasanuddin. "Ini surat dari Pak Nasution. Tak tahu saya, tolonglah disampaikan," kata Kivlan kepada Hasanuddin saat itu.

Ketika itu, Kivlan berada di ruang tamu sebelah kiri. Saat menunggu diterima Habibie, datanglah Muchdi bergabung dengannya. "Lima belas menit kemudian, tiba-tiba muncullah Mayjen Sintong Panjaitan (staf khusus Habibie) dari ruang makan. Sintong menyapa kami dan menanyakan keperluannya. Saya sampaikan ada surat dari Pak Nas untuk Pak Habibie, tapi isinya saya tidak tahu. Oleh Sintong, kami malah disuruh pulang. Tetapi kami tak mau, *wong* ajudan suruh menunggu kok," kata Kivlan.

Karena Kivlan dan Muchdi tetap bertahan, Sintong pun masuk ruang dalam kembali. "Tiba-tiba saat itu, muncul Pak Wiranto. Tiba-tiba saja datang dia. Saya bilang pada Pak Muchdi, panglima yang akan kita bicarakan di ruang tamu ada juga. Masak kita jenderal bintang dua mau bilang, 'Panglima mau diganti nih. Larilah kita terbirit-birit'," ujar dia. Takut? "Bukannya takut, tapi berbahaya. Saya kan bawa pistol, bisa saya tembak dia. Saya kan temperamen tinggi. Pak Muchdi juga Kopassus," ujar Kivlan. Akhirnya Kivlan dan Muchdi gagal bertemu Habibie, sementara surat dari Nasution sudah ada di tangannya.

Menurut Kivlan, kejatuhan Soeharto sebenarnya kehendak dunia internasional. "Pak Harto sudah mau membangkang terhadap

Amerika Serikat.” Wiranto, kata Kivlan, tidak sadar penjatuhan Soeharto ini permainan internasional. “Jadi, rencananya Soeharto jatuh, Habibie juga ikut jatuh.”

Menanti Buku Prabowo

Prabowo Subianto meminta mantan Presiden B.J. Habibie merevisi beberapa hal dalam buku *Detik-Detik yang Menentukan*. Terutama tulisan Habibie yang menyangkut peran Prabowo saat hari-hari pertama Habibie menjadi presiden pada akhir Mei 1998. “Saya perlu mengklarifikasi peristiwa pada 22 Mei 1998 di Istana Negara. Khususnya perbincangan saya dengan Pak Habibie yang ada dalam buku *Detik-Detik yang Menentukan*” kata Prabowo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 28 September 2006. “Jika Pak Habibie tidak mau meralatnya, saya akan tulis buku dengan versi saya dan biar masyarakat yang menilai mana yang benar dan mana yang *ngawur*,” ujarnya. “Saya harus meluruskan ini semua. Kalau saya diam, nanti dianggap membenarkan,” ujarnya seperti dikutip berbagai media massa.

“Tidak benar saya marah-marah. Tapi kalau ‘*shock*’ tentunya ya,” kata dia. Ditegaskannya, walaupun ia sempat kaget atas keputusan Habibie waktu itu, namun karena rasa hormatnya yang tinggi baik kepada Habibie maupun mertuanya, mantan Presiden Soeharto, ia tidak banyak bertanya apa-apa lagi.

Waktu itu, katanya, ia sempat bertanya apakah dirinya akan diganti dan Habibie menjawab, ya dan saat ditanya alasannya Habibie mengatakan hal tersebut atas dasar permintaan dari mertuanya sendiri.⁷² “Waktu itu saya memang menawar, atau menyarankan

⁷² Ketika ditanya apakah dirinya kemudian mengklarifikasi kepada Soeharto perihal pencopotan jabatannya tersebut benar-benar atas dasar permintaan mertuanya itu, Prabowo mengatakan tidak.

kan agar peralihan jabatan tersebut terlihat lancar dan baik di mata masyarakat tentunya butuh waktu,” ungkapnya. Ditegaskannya lagi, “Saya memimpin banyak pasukan dan perlu ada sertijab (serah terima jabatan) yang dilakukan di depan prajurit dan tentunya juga harus ada memorandum sertijabnya.”

Sementara itu, mantan Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan ada disinformasi yang diterima Habibie.”Saat itu kan masa transisi dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie. Sehingga banyak isu, banyak rumor. Ini menimbulkan disinformasi, khususnya di kalangan elite. Sedangkan di lapangan, tidak ada suatu gangguan, perubahan atau getaran apa pun yang berkaitan pengendalian operasi yang dipimpin Pangkoops Jaya. Jadi itu hanya ada disinformasi,” ujar Sjafrie.⁷³

Menurut Prabowo, menjelang kejatuhan Soeharto, ada kekawatiran tertentu di dunia seperti IMF yang ingin Indonesia bubar seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. “Silakan dicari di *Google*. Terang-terangan mereka mengatakan Indonesia akan pecah dan akan terjadi perang saudara. Nah ini kan *concern* kita. Mari kita menjaga ini jangan sampai terjadi lagi,” tandasnya.⁷⁴

Prabowo mengira ada sedikit insinuasikan kekhawatiran Presiden BJ Habibie akan dibunuh. “Semua itu, sejauh menyangkut keterlibatan saya, saya pandang tidak seperti itu. Karena itu saya perlu menjelaskan pada publik. Karena setelah terbitnya buku Pak Habibie itu banyak yang meminta penjelasan,” katanya. “Saya kaget ada

⁷³ *Media Indonesia*, 29 September 2006. Pada saat buku Habibie terbit, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Sekjen Dephankam. Ketika terjadi aksi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Sjafrie berpangkat mayjen dan menjabat Pangdam Jaya. Pada waktu itu berlaku komando operasi darurat (*contingency*) untuk pengamanan Jakarta. Sehingga otomatis seluruh komando utama operasi di wilayah Kodam Jaya berada di bawah kendali Sjafrie sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Jaya.

⁷⁴ “Prabowo Membantah Habibie”, *Republika*, 29 September 2006

tukang jahit yang nanya, apa benar Bapak telah menodong Pak Habibie? Tapi, meski kaget, saya tidak akan menanggapi rumor-rumor seperti itu. Saya sudah kebal dengan berbagai macam rumor.”⁷⁵

⁷⁵ “Prabowo Membantah Habibie”, *Republika*, 29 September 2006

Bab 4

Wiranto Menjawab

Salah seorang yang memegang peran penting dalam proses transisi kekuasaan dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie adalah Jenderal Wiranto. Saat itu ia menjabat Menhankam/Pangab.⁷⁶ Dalam masa jabatannya itu, telah muncul isu tentang dikotomi ABRI merah-putih dan ABRI hijau.⁷⁷

Nama Wiranto mulai dikenal publik pada saat ia menjadi ADC (*aide-de-camp*) atau ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1989. Kemudian karirnya meroket. Ia menjadi Panglima Kostrad, kemu-

⁷⁶ Jenderal Wiranto adalah *the rising star* dalam kepemimpinan ABRI pada saat itu. Karir Wiranto melejit setelah dia menjabat ajudan Presiden —yang membuatnya memiliki akses ke Presiden Soeharto setiap saat. Rival kuatnya dalam memperebutkan perhatian Presiden adalah Letjen Prabowo Subianto, yang telah berpangkat Letnan Jenderal dalam usia 46 tahun. Prabowo memiliki keunggulan, yaitu posisinya sebagai menantu Presiden. Namun, kasus Jenderal Wismoyo Arismunandar yang karirnya meredup setelah menjabat KSAD merupakan bukti empirik bahwa “orang dalam” keluarga Cendana pun bisa saja terjerembab.

dian dipromosikan menjadi KSAD, dan akhirnya menduduki pos sebagai Panglima ABRI, dan kemudian Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pemimpin militer pada saat krisis politik memuncak, merupakan posisi yang amat berkuasa tetapi juga riskan. Setiap saat, ABRI dicurigai hendak memberlakukan situasi darurat militer dan mengambil alih kekuasaan.

Pada hari-hari panjang Mei 1998, Wiranto mengaku pernah dituduh membangkang kepada Soeharto—yang melaporkan adalah Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto.⁷⁸ Menanggapi hal itu, Wiranto langsung bereaksi. Bersama KSAD Jenderal Subagyo HS dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, ia mendatangi Letjen Prabowo di Cendana. Wiranto mengaku menegur keras Prabowo.⁷⁹

Presiden Soeharto yang telah memutuskan mundur dari jabatannya, memberinya mandat melalui Inpres No. 16 Tahun 1998 untuk melakukan apa saja demi keamanan negara. Dengan inpres itu, alumnus Akademi Militer Nasional tahun 1968 itu bisa berbuat apa saja. Pilihan-pilihan politik apa saja yang ada di benak Wiranto saat itu? Bagaimana ia menilai situasi, dan akhirnya sampai kepada keputusan terakhir?

⁷⁷ ABRI hijau mengacu pada beberapa perwira tinggi yang dianggap dekat atau mendekatkan diri dengan kelompok Islam guna memperlicin karir militer maupun politiknya. Sosok yang representatif adalah Jenderal R. Hartono, mantan Pangdam Brawijaya yang kemudian menjadi KSAD, yang disorot karena dianggap ambisius. Selain dekat dengan tokoh-tokoh Islam, Jenderal R. Hartono juga menjadi perhatian banyak pihak karena kedekatannya dengan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, putri tertua Presiden Soeharto.

⁷⁸ Memoar Wiranto, *Bersaksi di Tengah Badai* (2003)

⁷⁹ Wahyu Dhyatmika, "Langkah Kuda Wiranto", dalam majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 33

Hari-Hari Terakhir Kekuasaan Soeharto

Tanggal 15 Mei 1998 dinihari, rombongan Presiden Soeharto mendarat di Halim Perdanakusumah setelah mengikuti pertemuan G-15 di Kairo, Mesir. Suasana ibukota telah porak poranda akibat kerusuhan tiga hari terakhir. Nyala api belum padam seluruhnya. Gelombang demonstrasi kian marak. Bukan cuma di ibukota, tetapi juga terjadi di beberapa daerah.

Presiden Soeharto langsung mencoba mengambil alih kendali. Hari itu juga, dia memanggil pembantunya satu per satu—mulai dari Wapres B.J. Habibie, lalu para menteri di bidang politik dan keamanan, Panglima ABRI, Jaksa Agung, dan kepala intelijen. Semua melaporkan situasi darurat yang melanda ibukota, dan cukup potensial menjalar ke kota-kota lain.

Karena situasi keamanan masih rawan, Soeharto mengandalkan kekuatan bersenjata untuk memulihkan situasi. Dia mengangkat Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Pangab Jenderal Wiranto, yang kebetulan adalah mantan ajudannya, dipercaya menjadi Panglimanya. Sebagai wakil, ditunjuk Jenderal Subagyo HS, Kepala Staf AD, yang kebetulan juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden. Pelantikan keduanya secara resmi direncanakan tiga hari kemudian.

Pengangkatan Jenderal Wiranto diduga membuat gerah sejumlah perwira tinggi militer—khususnya para rivalnya. Pengangkatan itu memang memusatkan kekuasaan yang besar pada satu orang, yaitu Jenderal Wiranto. Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto, salah seorang rival Wiranto, termasuk yang tidak puas. Dia datang ke mertuanya untuk menyatakan rasa ketidakpuasannya. Alasannya, loyalitas Jenderal Wiranto diragukan. Letjen Prabowo membawa bukti ketidaksetiaan Wiranto—yaitu berupa konsep per-

nyataan pers ABRI yang keluar setelah Jenderal Wiranto bertemu dengan Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid, berisi dukungan ABRI terhadap sikap NU yang meminta Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden.⁸⁰

Soeharto tidak percaya terhadap pengaduan menantunya. Dia memanggil Wiranto ke rumahnya di Jalan Cendana, suatu subuh di hari Ahad.⁸¹ Jenderal Wiranto bilang, jika Presiden Soeharto tidak lagi percaya padanya, dia memilih mundur. Konon Soeharto menggeleng dan berkata, "Teruskan saja tugasmu."

Malam harinya, giliran Jenderal Subagyo HS yang dipanggil ke Cendana.⁸² Presiden Soeharto konon menawarkan posisi sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional kepadanya. Tetapi Subagyo menolak.

Presiden Soeharto semakin ragu. Pengangkatan Wiranto akan memperuncing rivalitasnya dengan Prabowo. Akhirnya, Soeharto mengambil inisiatif membatalkan pelantikan Panglima Komando yang telah dipersiapkannya. Namun ia menandatangani Inpres No. 16 Tahun 1998 dan memberikannya kepada Jenderal Wiranto.

Situasi semakin tidak terkendali. Suara yang menuntut pengunduran dirinya semakin keras bergema. Harmoko, sang loyalis yang bertahun-tahun mengikuti apa pun kata Soeharto tanpa *reserve*, kini justru berteriak paling lantang menyuruhnya mundur. Soeharto pun semakin kesepian di puncak kuasa. Hanya militerlah yang masih loyal kepadanya. Berikutnya, 14 menteri menolak memperkuat kabinet baru yang akan dibentuk Soeharto. Mereka adalah menteri-menteri ekonomi, bidang yang sangat krusial untuk keluar dari krisis.

⁸⁰ "Mei 1998, Ketika Pucuk Republik Berganti", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006, hlm. 36-37

⁸¹ Memoar Wiranto, *Bersaksi di Tengah Badai* (2003)

⁸² Biografi Subagyo HS, *KSAD dari Piyungan* (2004)

Malam hari 20 Mei 1998, Soeharto mengambil keputusan sangat penting. Dia merencanakan mundur esok harinya, 21 Mei. Malam itu juga, ia memberitahukan rencananya kepada Wapres B.J. Habibie dan kepada Pangab Jenderal Wiranto.

Habibie Lebih Memilih Wiranto

Pada tahun 1991, Habibie bersama anggota Kabinet Pembangunan dan Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, duduk di lantai Masjid Istiqlal, sambil menantikan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden untuk bersama melaksanakan shalat Id.

Habibie berkisah, “Seorang muda berpakaian kemeja batik dengan sopan menyapa saya dari belakang sambil berbisik, agar diperkenankan kelak membantu saya dalam ICMI.”

Habibie kemudian bertanya, “Siapa Anda dan di mana Anda sekarang?”

“Saya Wiranto, Pak.”

“Wiranto siapa?”

“Saya Wiranto, dulu ADC Presiden dan sekarang ditugaskan sebagai Kepala Staf Pangdam Jaya membantu Pak Hendropriyono.”

Habibie lalu menjawab, “Insya Allah, iktikad dan niat baik Anda akan dikabulkan Allah SWT.”

Habibie mengaku sangat terkesan dengan kejadian ini.⁸³

Dalam *Detik-Detik yang Menentukan*, B.J. Habibie menampakkan terang-terangan rasa sukanya kepada Jenderal Wiranto. Habibie tak menyembunyikan kesan baiknya terhadap jenderal ini. Ia menilai Wiranto sebagai sosok yang beretika dan bisa dipercaya.

⁸³ Kisah itu diuraikan Habibie dalam *Detik-Detik yang Menentukan*, hlm. 61-62, sebagai *flashback* dalam adegan ketika Wiranto melaporkan kepada Habibie mengenai Inpres No. 16/1998.

Kesan itu muncul kuat saat Wiranto secara terbuka memperlihatkan Inpres No. 16 Tahun 1998 yang diterimanya dari Pak Harto sebelum *lengser*.

Wiranto memang memegang mandat dari Soeharto untuk melakukan sesuatu dalam keadaan darurat—misalnya mengumumkan negara dalam keadaan bahaya dan menetapkan situasi darurat militer. Banyak pihak membandingkan mandat itu setara dengan Supersemar yang diterima Soeharto dari Presiden/Pangti Soekarno.

Kepada Habibie, Wiranto menanyakan perihal instruksi presiden yang memberinya mandat keamanan tersebut. Namun Habibie pun menyuruh Wiranto menyimpan saja dokumen itu. Ia menilai, bisa saja Wiranto mengerahkan pasukan untuk merebut kekuasaan, tapi itu tak dilakukannya. Sehingga makin besarlah rasa simpati Habibie terhadap Wiranto. Inilah yang kemudian membuat Habibie tetap mempertahankan posisi Wiranto sebagai Panglima ABRI.

Hal lain yang dituturkan oleh Habibie dalam memoarnya adalah “usulan” Prabowo pada saat kabinet akan dibentuk. Ketika menyusun kabinet pada 22 Mei, ia menerima surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Dalam surat yang dibawa dua perwira tinggi Angkatan Darat itu, Nasution menyarankan agar Habibie mengangkat Jenderal Subagyo H.S. menjadi Panglima ABRI (Pangab) dan Letjen Prabowo Subianto sebagai KSAD. Tapi Habibie bergeming. Ia tetap mempertahankan Jenderal Wiranto di posisi Pangab. Padahal, di mata Prabowo dan kawan-kawan, Wiranto telah membuat kesalahan besar dengan ketidakmampuannya mengendalikan kerusuhan massal di Jakarta, pertengahan Mei 1998.

Wiranto Menjawab

Setelah pensiun dari dinas militer, Wiranto aktif dalam politik praktis. Pada periode 1998-1999 ia sempat tiga kali ditawari

menjadi Wakil Presiden, oleh B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Semuanya ditolak. Baru pada tahun 2004, ia mencalonkan diri menjadi Presiden RI—namun kalah dalam pemilihan putaran pertama.

Menanggapi rumor bahwa militer ikut bermain dalam proses mundurnya Presiden Soeharto yang diawali kerusuhan massal, Mei 1998, Wiranto menjawab: “Tuduhan itu benar-benar tidak rasional. Militer yang mana? Saya pimpinan militer saat itu dan saya pastikan tidak ada skenario seperti itu. Tidak masuk akal merancang sesuatu yang bertentangan dengan Saptamarga dan sumpah prajurit. Dan lagi, militer tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari peristiwa itu.”⁸⁴

Menanggapi informasi dirinya memerintahkan Kepala Staf Umum ABRI, Letjen Fachrul Rozi, untuk mencegah masuknya pasukan Kostrad dari luar Jakarta pada saat kerusuhan Mei 1998, Wiranto menjawab: “Menhankam/Pangab berada pada tingkat penentu kebijakan dan bukan pada wilayah pelaksanaan operasional yang dilimpahkan kepada para Panglima Kodam dan Kapolda. Pada 14 Mei 1998 malam, saya mengadakan rapat luar biasa di Garnisun Ibu Kota. Saya bertanya kepada Pangdam Jaya dan Kapolda Metro selaku pengendali operasi di Jakarta, ‘Apakah Anda masih sanggup melaksanakan tugas? Kalau tidak, saya akan ambil alih.’ Mereka menjawab, ‘Masih sanggup, Pak.’

Selanjutnya, atas permintaan mereka, saya berikan tambahan kekuatan yang didatangkan dari daerah lain. Jadi, tidak mungkin Menhankam/Pangab dan staf seenaknya mencampuri urusan para pimpinan di daerah mereka.”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22

⁸⁵ Wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22

Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto pada tanggal 18 Mei 1998 menerima Inpres No. 16 Tahun 1998 dari Presiden Soeharto untuk mengambil segala tindakan pengamanan yang dianggap perlu apabila situasi berubah menjadi *chaos* dan tidak terkendali.⁸⁶ Jenderal Wiranto mengatakan bahwa kewenangan yang besar apabila digunakan pada saat yang tidak tepat, tidak akan memberikan manfaat, bahkan bisa jadi berakibat fatal. Pada malam hari tanggal 20 Mei, Pak Harto menyampaikan secara langsung rencananya mengundurkan diri. Saksi yang melihatnya adalah Mayjen Endriartono Sutarto⁸⁷ dan Jenderal Subagyo HS.⁸⁸

Lalu, apa yang dilakukan Jenderal Wiranto setelah menerima Inpres tersebut? Berikut ini pengakuannya:

“Saya melakukan analisis yang mendalam. Istilah militernya, membangun perkiraan keadaan secara cepat. Pertama, sewaktu menyerahkan perintah tersebut Presiden Soeharto berkata, ‘Surat ini digunakan atau tidak, terserah kepada kamu’. Artinya, apa pun keputusannya, diserahkan kepada saya untuk mempertimbangkan, menimbang untung rugi dan manfaatnya bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Analisa saya yang kedua, inpres itu bukan semata-mata perintah untuk memberlakukan suatu darurat militer, tetapi penjabaran dari Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 untuk mengamankan pembangunan nasional. Ketiga, dengan mendukung proses politik pengunduran diri Presiden Soeharto dan pengangkatan Wapres B.J. Habibie sebagai penggantinya, sebenarnya saya telah melaksanakan inpres itu dengan cara yang paling kecil risikonya bagi kesinambungan eksistensi bangsa.”⁸⁹

⁸⁶ Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI AD*, 2004, hlm. 88

⁸⁷ Pada saat peristiwa itu terjadi, dia menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

⁸⁸ Jenderal Subagyo HS menjabat sebagai KSAD pada saat itu.

⁸⁹ Wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22

Menurut Jenderal Wiranto, saat itu dia memiliki paling tidak tiga pilihan. Pertama, mempertahankan Presiden Soeharto. Risikonya, konflik akan berkepanjangan dan jatuh korban sangat besar. Padahal, Presiden Soeharto sendiri sudah menyatakan tidak akan mempertahankan jabatannya dengan kekuatan senjata. "Artinya," kata Wiranto, "Kalau saya memilih itu, boleh disebut ambisi militerlah yang menjadi dominan."⁹⁰

Pilihan yang kedua adalah mengumumkan keadaan darurat militer, lalu militer mengambil alih pemerintahan dan mengantar kepada proses pemilu yang dipercepat. Risikonya, di satu sisi pemerintahan militer akan dianggap sebagai metamorfosa dari pemerintahan Orde Baru; di sisi lain, tidak mendapat dukungan internasional, dan amat besar kemungkinan akan mendapat sanksi-sanksi. Indonesia pasti akan sulit memperbaiki ekonomi nasional yang sungguh terpuruk manakala masalah keamanan masih merongrong.

Pilihan ketiga, yang kemudian diambil, adalah mendukung dan mengamankan proses politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto dan pengangkatan Wapres B.J. Habibie sebagai penggantinya.

Namun, Pangab Jenderal Wiranto pada saat itu juga membayangkan risiko terburuk yang mungkin terjadi. "Misalnya, untuk membersihkan kekuatan demonstran dari kompleks MPR/DPR di Senayan saja,antisipasi korban sekitar 250 orang mati dan masih bisa berlanjut jauh lebih besar dari jumlah itu. Tentu kita tidak menghendaki itu. Dan yang lebih penting, saya tidak ingin TNI berhadapan dengan gerakan prodemokrasi."⁹¹

⁹⁰ Wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22

⁹¹ Wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006, hlm. 20-22

Bab 5

Tradisi Kudeta dan Konflik Internal AD

Suatu hari yang tenang tanggal 26 Februari 1983, seseorang menyampaikan surat langsung kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Jusuf. Surat itu berasal dari Mayor Anu, seorang perwira yang dikenal baik Jenderal M. Jusuf. Isinya adalah sebagai berikut:⁹²

Bapak yang Tercinta,

Saat ini adalah detik-detik bersejarah. Bapak terpanggil untuk menyelamatkan Negara. Bapak jangan goyah. Demi TNI kita yang tercinta kalau berdiri teguh sekarang—pasti menang. Dukungan cukup kuat. Kami siap membela Kepentingan Bangsa di atas segala hal lain. 1945, 1948, 1965 dan sekarang!

Kami ingin menghadap langsung untuk laporan. Tetapi Bapak dalam keadaan selalu diamati! Jangan percaya siapa saja.

Termasuk SPRI, Walpri, pembantu rumah tangga, supir. Semua ruangan Bapak di kantor dan di rumah disadap. Semua telepon disadap. Semua gerakan Bapak diikuti. Kalau Bapak mau menerima kami nanti kita bisa atur pertemuan. Kalau bisa segera. Pak Yogi⁹³ juga diamati. Semua—Pak Sanif,⁹⁴ Himawan,⁹⁵ dll. Jangan bicara terbuka di ruangan mana pun.

Mohon jawaban segera lisan, surat ini mohon segera dibakar.⁹⁶ Kalau Bapak setuju bilang saja—okay, atur saja. Kami akan hubungi lagi.

*Demi TNI tercinta.*⁹⁷

Akhirnya pertemuan “rahasia” itu pun terselenggara.

Pertemuan pun diatur di sebuah kompleks militer yang cukup besar dan sering dikunjungi Jenderal M. Jusuf di wilayah Jakarta Timur. Di sana, Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf menemui sekelompok perwira muda yang dikumpulkan Mayor X yang menulis surat padanya. Intinya, para perwira muda itu tidak puas terhadap rencana pergantian Menhankam/Pangab dari M. Jusuf kepada L.B. Moerdani.

Di sana Jenderal M. Jusuf mampu menunjukkan kewibawaannya dan meminta mereka agar tidak melakukan perlawanan atau

⁹² Biografi Jenderal M. Jusuf, *Panglima Para Prajurit* (Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 270-271

⁹³ Letjen Yogie S. Memet, Danjen Kopassandha, kelak menjabat sebagai Mendagri

⁹⁴ Asisten Operasi Hankam

⁹⁵ Letjen Himawan Soetanto, Kepala Staf Operasi Hankam

⁹⁶ Tetapi Jenderal M. Jusuf tidak membakar surat tersebut, melainkan menyimpannya. Dalam Biografi Jenderal M. Jusuf, *Panglima Para Prajurit* (2006), surat tersebut disertakan sebagai lampiran—lihat halaman 443.

⁹⁷ Surat ini tidak mencantumkan tanda tangan atau nama, tetapi dari si pembawa surat, Jenderal M. Jusuf tahu siapa yang menulisnya.

gerakan lain yang bisa merusak jatidiri TNI. Sekitar tiga jam ia berada di sana. Dalam biografi M. Jusuf dituliskan, “Dalam waktu tiga jam Jenderal Jusuf mampu memadamkan sebuah rencana atau kehendak untuk mengambil alih kepemimpinan negara, akibat kekecewaan dan ketidakpuasan mereka atas rencana pergantian Menhankam/Pangab.”⁹⁸

Kemudian, “Meskipun sejumlah kecil perwira pasukan elit belum tentu bisa mengambil alih kekuasaan dengan mudah, tetapi menurut Jenderal Jusuf hal demikian tidak boleh terjadi dalam tubuh TNI. Kata Jusuf, sejarah kita akan mencatat selama berabad-abad aib itu bila sampai terjadi.... Sebuah peristiwa yang mengerikan, kalau terjadi, berupa dorongan untuk melakukan kudeta bisa dihindarkan.”⁹⁹

Riak-Riak Gejolak

Sepenggal kisah di atas merupakan ilustrasi dari kisah nyata, betapa gejolak-gejolak dalam tubuh ketentaraan biasa terjadi. Pada dekade 60-an, sejumlah perwira muda dari jajaran Angkatan Laut juga pernah melakukan hal serupa. Biasanya, gejolak itu muncul sebagai respon atas pergantian kepemimpinan elit militer dari figur populer kepada figur yang kurang disukai para prajurit, atau dilatarbelakangi masalah kesejahteraan.

Beberapa peristiwa pemberontakan seperti PRRI/Permesta dan Kahar Muzakar juga dilatarbelakangi ketidakpuasan serupa. Namun, mereka tidak berinisiatif merebut kekuasaan dengan cara kudeta militer. Mereka “hanya” menyatakan ketidaktaatan karena telah kecewa.

⁹⁸ Biografi Jenderal M. Jusuf, *Panglima Para Prajurit* (Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 272-273

⁹⁹ Biografi Jenderal M. Jusuf, *Panglima Para Prajurit* (Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 272-273

Sejak dekade 90-an, tidak pernah lagi kasus pergolakan perwira muda mencuat ke permukaan. Namun di kalangan elit, terjadi rivalitas yang kadangkala meruncing. Maklum saja, pada saat itu tentara memang sedang berada di puncak kuasa. Siapa yang karirnya mengilap di jajaran ketentaraan, memiliki peluang bagus untuk memegang jabatan politik yang strategis di negeri ini.

Namun, dalam sejarah Indonesia merdeka, sempat terjadi apa yang diistilahkan sebagai “pasukan liar” yang mengepung istana. Pada tanggal 11 Maret 1966, ketika dilangsungkan Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, sempat dikabarkan ada “pasukan liar” tanpa tanda kesatuan, yang kehadirannya memprovokasi Bung Karno untuk segera meninggalkan Istana Merdeka dan terbang dengan helikopter menuju Istana Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang kelak digunakan oleh Letjen Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan.

Pada tanggal 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa yang cukup menarik. Moncong meriam tentara diarahkan ke Istana. Para petinggi militer mengajukan tuntutan politik agar Presiden Soekarno bertindak lebih tegas terhadap kabinet yang dianggap lebih sibuk berpolitik daripada berkarya nyata untuk bangsa dan negara. Peristiwa itu memakan korban, yaitu dicopotnya Jenderal Nasution dari jabatan KSAD.

Dalam sejarah militer modern Indonesia, kudeta lebih eksis sebagai “ancaman potensial” dan bukan sesuatu yang riil. Seperti yang diungkapkan dalam biografi M. Jusuf di atas, kata ‘kudeta’ dimunculkan sebagai titik kemungkinan ekstrem dari sekelompok perwira muda yang tidak puas. Mungkinkah mereka benar-benar melakukan kudeta? Sangat kecil peluangnya. Jadi, kata ‘kudeta’ adalah sesuatu yang tidak konkret, hanya merupakan bayangan

semu, yang kadang-kadang digunakan untuk mendramatisasi permasalahan. Mungkin itulah yang terjadi ketika Habibie (dan juga M. Jusuf) menulis bukunya.

Yang terjadi di tahun 1998 tidaklah seperti tahun 1952 atau 1965-66. Tidak ada gejala perpecahan antar angkatan. Tidak ada gejala kudeta. Tidak ada gejala pembangkangan. Yang nampak adalah adanya rivalitas di dalam tubuh Angkatan Darat yang menimbulkan sejumlah konflik. Rivalitas tersebut bukan muncul dengan sendirinya, melainkan buah dari apa yang terjadi pada generasi sebelumnya, ketika polarisasi antarfaksi dalam militer tampak begitu meruncing.

Nampak sekali, Prabowo cs dan Wiranto saling memperebutkan pengaruh guna mengincar jabatan prestisius, yaitu Panglima ABRI. Kelompok Prabowo merasa bahwa Jenderal Wiranto sudah waktunya diganti, antara lain sebagai wujud pertanggungjawaban kegagalan mengamankan ibukota dari kerusuhan. Sebaliknya, Jenderal Wiranto menganggap apa yang dilakukan Prabowo—antara lain memberi masukan kepada Presiden Soeharto—sebagai sesuatu yang tidak patut. Tindakan Prabowo mempengaruhi Habibie dalam membentuk kabinet, mungkin juga dianggap sudah di luar kepatutan.

Sejak Presiden Soeharto berkuasa, kedua belah pihak sudah saling berebut pengaruh di hadapan RI-1. Prabowo adalah “orang dalam” Cendana. Sedangkan Wiranto, berkat pengalamannya sebagai ajudan Presiden, tidak kalah dekat dengan Presiden Soeharto. Suasana kompetisi itu berlanjut ketika tongkat kepemimpinan nasional berpindah ke tangan B.J. Habibie. Jenderal Wiranto, terlepas dari persoalan Inpres No. 16/1998, nampaknya lebih beruntung karena ia berhasil mendapatkan simpati Presiden baru, Habibie.

Para Jenderal Angkat Bicara

Berikut ini kesaksian para jenderal yang pada Mei 1998 terlibat langsung sebagai pelaku sejarah (dipetik dari majalah *Tempo* edisi 8 Oktober 2006 hlm. 38-39 dan *Media Indonesia Online*)

Subagyo Hadisiswoyo

(Mei 1998 menjabat KSAD, kini Jenderal Purnawirawan)

Setelah *lengser*-nya Presiden Soeharto, kondisi di Kostrad dan Kopassus belum sepenuhnya kondusif. Ketegangan terasa di antara petinggi militer. Siapa berada di pihak mana, tidak mudah ditebak.

Saya tidak mengerti pergerakan pasukan di Patra Kuningan seperti yang disebutkan Pak Habibie (dalam bukunya). Tapi penempatan semua pasukan sebenarnya sudah ditetapkan, yaitu berada di bawah kendali Panglima Komando Operasi. Pergerakan hanya bisa dilakukan atas perintah Panglima ABRI.

Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus saat itu hanya bertugas menyiapkan pasukan. Misalnya, Panglima Kodam menentukan kebutuhan pasukan berapa, mereka harus menyiapkannya. Saya, sebagai KSAD, hanya menjadi pembina.

Pada 22 Mei siang, setelah Presiden Habibie mengumumkan kabinetnya, saya mendapat perintah dari Panglima ABRI, copot Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus hari itu juga. Lepas tengah hari, diputuskan Mayor Jenderal Johny Lumintang ditetapkan sebagai pengganti Prabowo.

Rencananya, serah terima jabatan dilakukan pukul 15.00. Sampai menjelang upacara, Prabowo tidak tampak. Diperoleh informasi bahwa dia sedang berada di Istana Presiden. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan di sana.

Agak sore, akhirnya Prabowo datang. Dia masuk dengan berpakaian dinas, lengkap dengan pistolnya, dikawal anak buahnya

yang menumpang tiga mobil Range Rover. Ketika saya sampaikan adanya perintah penggantian dirinya, Prabowo keberatan.

Ia lalu meminta pergantian ditunda tiga bulan. Saya menelepon Panglima ABRI untuk menanyakan apakah bisa. Jawaban Panglima: "Pergantian itu harus dilaksanakan hari itu juga."

Hubungan saya dengan Prabowo amat dekat, baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan. Karena itu saya katakan, "Wo, kalau kamu nolak, berarti kamu ndak menghormati atasan dan senior-mu." Akhirnya ia mau menerima penggantian dirinya.

Tentang usulan Prabowo kepada Presiden Habibie agar saya dijadikan Panglima ABRI, hal itu tidak pernah dibicarakan dengan saya. Tapi, saat bertemu dengan Pak Harto pada 16 Mei malam, Prabowo pernah mengusulkan hal yang sama. Saya lalu menegur dia karena menganggap cara itu kurang pas.

Muchdi Purwoprandjono

(Mei 1998 berpangkat Mayjen dan menjabat Danjen Kopassus, pada Oktober 2006: Mayor Jenderal Purnawirawan)

Saya dan Prabowo tidak pernah sekalipun memikirkan untuk kudeta. Kenapa? Karena sekali kudeta dilakukan, pasti akan selalu berulang seperti yang terjadi di Thailand.

Jika mau, kamu dengan mudah melakukannya saat itu. Sebagian besar pasukan yang ada di Jakarta saat itu kan berasal dari Kostrad dan Kopassus. Tapi Prabowo memang tidak pernah berpikir untuk melakukan kudeta.

Perlu saya sampaikan, semua pasukan di Jakarta saat itu berada di bawah kendali Panglima Komando Operasi Jaya, Sjafrie Sjamsoeddin. Markas Besar ABRI juga telah mengatur pembagian kewenangan pengamanan oleh masing-masing kesatuan.

Kopassus saat itu diberi tugas mengamankan Istana dan rumah Presiden. Kostrad ditugasi mengawal obyek-obyek vital. Lalu marinir mendapat tugas mengamankan kantor-kantor diplomatik negara asing di Jakarta. Semua itu diketahui oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto.

Sjafrie Sjamsoeddin

(Pada Mei 1998 menjabat Pangdam Jaya merangkap Panglima Komando Operasi Jaya, dengan pangkat mayor jenderal. Oktober 2006 menjabat Sekretaris Jenderal Dephankam, letnan jenderal)

Isu yang disinformatif dan berbau politisasi seperti kudeta terkadang mengorbankan prajurit di lapangan. Isu kudeta hanya berkembang di kalangan elite, tidak masuk ke jajaran operasional.

Saya pastikan bahwa operasional seluruh jajaran TNI berada di bawah kendali Panglima Komando Operasi Jaya. Saya mendapat mandat dari Panglima ABRI pada 14 Mei 1998 untuk mengambil alih komando pasukan di Jakarta.

Sudah pasti saya tahu betul penempatan dan kedudukan semua pasukan. Jadi, tidak ada kekhawatiran sama sekali akan terjadi sesuatu. Kalau pun terjadi sesuatu, akan mudah saya lumpuhkan karena komando, kendali, dan logistik ada di tangan saya. Dalam hitungan jam, pasti sudah bisa saya tumpas. Saya menguasai wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Ada 178 kompi (satu kompi sekitar 100 orang) dan 194 kendaraan tempur dari tiga angkatan. Lalu, sejak 13 Mei datang pasukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Makassar. Semuanya dikerahkan untuk membantu menangani kerusuhan di Jakarta.

Pasukan tambahan itu diangkut langsung oleh TNI. Jadi, kalau ada pasukan-pasukan yang tidak terkendali, dari mana datangnya? Dari Makassar? Mau pakai apa?

Pengendalian oleh Komando Operasi Jaya waktu itu solid betul. Tidak mungkin ada orang mau melakukan kudeta pada waktu itu. Dan tidak ada kemungkinan Prabowo mau mengendalikan pasukan sendiri. Yang bisa ia kendalikan hanya pasukan yang tersisa di barak-barak. *Lha*, yang di barak-barak itu apa mau kudeta?

Kivlan Zen

(Pada Mei 1998 menjabat Kepala Staf Kostrad, dengan pangkat mayor jenderal. Pada Oktober 2006, mayor jenderal purnawirawan)

Waktu Habibie menyusun kabinet pada 21 Mei 1998 malam, kami mendengar Wiranto, yang sudah gagal mengatasi kerusuhan, akan dipertahankan menjadi Panglima ABRI. Makanya, Prabowo datang pada malam itu dan mengusulkan agar Subagyo HS diangkat menjadi Panglima.

Habibie hanya menjawab, nanti dipertimbangkan. Pada 22 Mei dinihari, pukul 03.00, Prabowo memerintahkan saya menghadap Pak Nasution, yang amat dihormati oleh Habibie. Pak Nas diminta menyurati Habibie agar Subagyo dijadikan Panglima ABRI.

Malam itu kami tidur di kantor. Pukul 06.00, saya datang ke rumah Pak Nas. Beliau sedang sakit. Saya lalu menyampaikan permintaan Prabowo. Pak Nas menjawab dirinya tak bisa menulis, sekretaris pribadinya juga belum datang. Akhirnya Pak Nas meminta saya menulis surat, yang kemudian akan ia tanda tangani.

Maka, saya menulis tangan di selebar kertas—Anda bisa cek surat yang dimiliki Habibie pasti cocok dengan tulisan saya. Isinya:

Kepada ananda Habibie,

Melihat perkembangan situasi terakhir, perlu diambil langkah yang tepat. Kelihatannya yang bisa mengatasi keadaan ada-

lah Jenderal Subagyo. Untuk pengganti Subagyo, ananda angkatlah Prabowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Pak Nas lalu tanda tangan.

Usulan Prabowo menjadi KSAD itu sebenarnya saya yang menambahkan. Prabowo tak pernah meminta hal itu dicantumkan. Tapi, bila benar dia jadi KSAD, saya kan bisa naik menjadi Panglima Kostrad, ha ha ha....

Dari Pak Nas, saya langsung ke rumah Habibie di Kuningan. Surat saya serahkan melalui ajudan, Kolonel Tubagus Hasanuddin, karena Pak Habibie sedang sarapan. Seperempat jam kemudian datang Muchdi (Danjen Kopassus). Tak lama kemudian, Sintong Panjaitan (saat itu ajudan Presiden) keluar dari ruang makan Habibie.

Tiba-tiba datang Pak Wiranto. Dia masuk melalui pintu lain. Karena enggak enak, bisa-bisa kami berantem di sana, ya sudah kami cepat-cepat keluar. *Ngacir* kita.

Setelah salat Jumat di kantor, saya dan Prabowo menemui adik kesayangan Habibie, Fanny, di kantor Otorita Batam. Kami meminta dia menghubungi kakaknya agar Subagyo dijadikan Panglima. Tapi belum selesai kami bicara, ada telepon dari kantor yang meminta kami segera kembali. Kami diminta segera menyerahkan pataka, bendera kesatuan Kostrad, ke Markas Besar Angkatan Darat. Segera saya berpikir: wah, kami dicopot.

Prabowo langsung ke istana. Waktu itu dia dikawal oleh satu mobil dengan sekitar tujuh orang anggota pasukan. Dari Istana, Prabowo baru pergi ke Markas Besar Angkatan Darat. Di sana ia menyerahkan pataka Kostrad kepada KSAD Subagyo. Sebulan kemudian, saya dicopot dari jabatan Kepala Staf Kostrad.

Dibyo Widodo

(Pada bulan Mei 1998 menjabat Kepala Polri, Jenderal Polisi. Pada Oktober 2006: Jenderal Purnawirawan)

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Dibyo Widodo mengatakan tidak ada kudeta saat Mei 1998. Saat ditanyakan soal adanya pernyataan mantan presiden Habibie bahwa pada Mei 1998 Pangkostatrad Letjen Prabowo akan melakukan kudeta, Dibyo menyatakan tidak tahu. "Tanyakan ke Pak Wiranto, apa yang dia bisikkan ke Pak Habibie," ujar Dibyo.

Mantan Kapolri ini meletakkan jabatan Juli 1998, karena tidak bersedia anak buahnya dituduh menembak empat mahasiswa Trisakti oleh pimpinan TNI. Karena merasa anak buahnya tidak melakukan kesalahan prosedur dan tidak menembak mahasiswa Trisakti, Dibyo nekad melawan perintah Wiranto agar dirinya menyerahkan belasan anak buahnya.

Dia mengaku saat 13 Mei 1998 memang banyak panser. Namun, panser yang jumlahnya banyak di beberapa tempat itu, diketahuinya sebagai persiapan mencegah demo besar-besaran. "Dua-tiga minggu sebelum itu, ada informasi adanya demo besar-besaran yakni Amien Rais membawa satu juta umat ke istana. Jadi, pengerahan panser ini guna menghindari dan memblok demo bergerak ke istana," ujar Dibyo.

Ia menjelaskan bahwa sejak 10 atau 18 April 1998, panser sudah banyak di depan Mabes TNI. Hal itu diketahui karena ada rapat-rapat keamanan dengan Pangab Jenderal Wiranto, KSAL Laksmiana Arif Kusharyadi, KSAU Marsekal Satria Tubagus, Pangkostatrad dan lainnya. "Namun, panser itu saya dengar untuk mencegah demonstrasi sejuta umat. Saya juga tidak tanya ke Pak Wiranto, karena saya pikir itu kan kebijakannya," ujar Dibyo.

Yang jelas, kata Wiranto, rapat-rapat pengamanan di Mabes ABRI saat itu, tidak sedikitpun ada perkataan maupun perbincangan soal isu kudeta. Perintah buat Polri dan jajarannya, hanya menjaga kondisi aman, tertib dan terkendali saja.

Diakui Diby, Wiranto saat itu memiliki dua institusi yakni dia sebagai Pangab dan dia sebagai Kepala Bakorstanas. "Mungkin saja di rapat itu ada perbincangan isu kudeta. Walau Kapolda Metro Jaya yang juga kepala Bakorstanasda saat itu, almarhum Mayjen Pol (Purn) Hamami Nata, tidak pernah melapor ada isu itu," kata Diby. Yang jelas, Diby tidak pernah mendengar ada percobaan kudeta. "Kuncinya hanya Pak Wiranto, Pak Habibie dan Pak Prabowo," katanya.¹⁰⁰

Tradisi Kudeta

Hingga detik ini, boleh dibilang tidak ada tradisi kudeta dalam sejarah Indonesia. Memang ada riak-riak resistensi dan gejolak ketidakpuasan, namun itu tidak cukup untuk menggerakkan pasukan menumbangkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Mengapa kudeta sering disebut sebagai tradisi? Sebab sekali muncul kudeta militer untuk meraih kekuasaan, selalu besar kemungkinan untuk terulang di masa depan.

Kita bersyukur TNI-AD tidak punya tradisi melakukan kudeta seperti di Thailand dan juga di Filipina (yang gagal). Kita tetap harus mempertahankan tradisi itu. Namun di sisi lain, kita juga banyak mengalami pergantian presiden secara tidak normal: Bung Karno yang dilengserkan oleh MPRS, Soeharto yang *lengser* setelah didesak oleh rakyat serta pimpinan DPR/MPR, dan Gus Dur yang di-*lengser*-kan MPR karena menerbitkan dekrit untuk membubar-

¹⁰⁰ Saat itu, Kepolisian belum independen, dan secara struktural masih berada di bawah Panglima ABRI

kan DPR. Semoga tidak ada lagi presiden kita yang *lengser* dengan cara tidak normal. Sehingga apa yang telah ditulis dalam konstitusi, benar-benar menjadi acuan yang benar-benar dihormati dalam kancah politik praktis kita.

Jika buku Habibie menyiratkan adanya gejala kudeta, fakta-fakta yang ada di lapangan tidak cukup untuk menyimpulkan demikian. BJH mengisahkan, pada tanggal 22/5/98 pagi menerima laporan dari Pangab Jenderal Wiranto tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Istana Merdeka dan kediaman B.J. Habibie di Kuningan, yang terjadi tanpa dilaporkan kepada Pangab.

Berdasarkan laporan itu, Presiden Habibie memberikan perintah kepada Pangab untuk mengganti Panglima Kostrad Prabowo Subianto pada hari itu juga dengan Letjen Johny Lumintang. Karena pergantian itu, Prabowo menghadap Presiden Habibie untuk menyampaikan keberatan. Dalam kesempatan itu, terjadilah dialog berbahasa Inggris yang menurut B.J. Habibie, di dalamnya Prabowo menyebut BJH sebagai presiden yang naif.

Benarkah ada gerakan (liar) pasukan Kostrad itu? Apakah Wiranto telah mengecek kepada Prabowo atau belum? Siapakah yang melaporkan gerakan itu kepada Wiranto? Kita langsung teringat pada silang sengketa antara Wiranto dan Prabowo dalam masalah upaya Prabowo mencegah Wiranto pergi ke Malang pada tanggal 13 Mei 1998. Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi Wiranto melalui telepon, tetapi tidak bisa berbicara langsung, hanya melalui ajudan. Disampaikannya pesan melalui ajudan bahwa Pangab Wiranto tidak perlu pergi ke Malang, tetapi konsentrasi pada apa yang terjadi di Jakarta yang lebih gawat. Tetapi, ajudan tersebut merasa tidak menerima pesan itu.

Silang sengketa itu sudah terungkap tidak lama (beberapa bulan) setelah peristiwanya terjadi sehingga kemungkinan lupa terha-

dap apa yang terjadi amat kecil. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ajudan memang tidak menerima pesan Prabowo? Atau dia menerima pesan itu, tetapi lupa menyampaikannya? Atau dia menerima pesan itu, tetapi sengaja tidak menyampaikannya kepada Wiranto? Atau Wiranto menerima pesan itu, tetapi mengabaikannya karena menganggap pesan itu tidak penting? Atau Prabowo ingin menyampaikan pesan itu dan belum sempat menyampaikannya, tapi merasa telah menyampaikan? Semuanya masih merupakan misteri.

Dalam kaitan laporan adanya gerakan (liar) Kostrad pada 21 Mei 1998 itu, ada beberapa kemungkinan.¹⁰¹

Pertama, Wiranto amat percaya kepada perwira yang melaporkan dan langsung yakin terhadap laporan itu dan merasa tidak perlu ada klarifikasi kepada Prabowo karena situasinya darurat. Klarifikasi akan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan negara.

Kedua, Wiranto mencoba melakukan klarifikasi, tetapi tidak berhasil mengontak Prabowo.

Ketiga, kemungkinan Pangab Wiranto berbohong atau membuat laporan yang tidak benar kepada Presiden Habibie.

Ketiga kemungkinan itu harus dikemukakan.

Sejauh itu adalah keyakinan Wiranto demi kepentingan bangsa dan negara, menjadi wewenangnya untuk membuat keputusan melaporkan gerakan itu kepada presiden (kemungkinan pertama). Orang bisa membuat penilaian berbeda terhadap keputusan itu. Ada yang menganggap Wiranto terburu-buru dan kurang hati-hati. Sebaliknya, ada yang menganggap hal itu menunjukkan ketegasan Wiranto yang berani mengambil keputusan dengan cepat sesuai keyakinannya. Kalau ternyata anggapannya keliru dan ada yang menganggap dia berbohong, itu adalah risiko yang harus dipikul-

¹⁰¹ Salahuddin Wahid, "Prabowo, Habibie, dan Wiranto" (*Sumex*, 30 September 2006)

nya. Mungkin, seandainya SBY yang jadi Pangab saat itu, yang terjadi mungkin bisa berbeda.

Harus diakui, Habibie, Wiranto, dan Prabowo adalah tiga tokoh penting pada masa transisi itu. Tinggal Prabowo yang belum menulis buku. Sebagai jenderal yang ketika itu paling banyak membawa pasukan, bekas menantu Soeharto ini punya kekuatan militer terkuat namun tak punya legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan. Jenderal Wiranto, yang mendapat surat perintah Soeharto untuk mengambil alih keamanan, memiliki legitimasi itu tetapi tidak diyakini didukung pasukan TNI. Sedangkan B.J. Habibie, sebagai wakil presiden, adalah sosok yang secara konstitusional paling berhak mengisi posisi presiden, setelah Soeharto menyatakan berhenti. Namun, ia dianggap masyarakat sebagai orang terdekat Soeharto, hingga mendapat penolakan dari para aktivis penggerak reformasi.

Habibie bertahan di puncak kekuasaan tak sampai dua tahun. Pada masa pemerintahannya, pemilihan umum berlangsung dan berbagai ketetapan MPR maupun undang-undang yang bersifat reformis lahir di bawah tekanan demonstrasi mahasiswa yang terus membanjir. Pers Indonesia mendapatkan kembali kemerdekaan, dan hak-hak politik rakyat yang terpasung diraih kembali. Semua konsesi itu membuat Indonesia menjadi lebih demokratis sekaligus membuat masa kepresidenan Habibie berhenti karena laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR

Buku Habibie adalah kisah kenaikannya menjadi presiden dan apa yang terjadi pada masa pemerintahannya. Tidak semua kejadian diceritakan dengan gamblang. Habibie sendiri mengakui buku itu hanya mengungkap sekitar 70 persen dari catatannya. Sisanya, kata Habibie, hanya akan dibuka jika ia yakin hal itu tidak akan mengganggu ketenteraman masyarakat berdemokrasi.

Belum jelas benar informasi apa saja yang masih disembunyi-kan Habibie. Kalaupun komentar berbagai pelaku penting pada masa itu tentang buku ini yang jadi patokan, kelihatannya yang masih gelap adalah mengenai apa yang akhirnya menyebabkan Soeharto memutuskan berhenti dan mengapa hubungannya dengan Habibie setelah ia berhenti berubah 180 derajat. Selain itu, ini yang paling penting, mengapa tentara terkesan membiarkan kerusuhan Mei 1998 terjadi.

Posisi tentara dan polisi pada masa itu memang tak mudah. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis keuangan telah membuat gelombang protes terhadap kepemimpinan Soeharto yang dianggap korup terus membesar. Keadaan ini membuat posisi ABRI tersudut: mendukung Soeharto berarti harus bertindak keras pada aktivis reformasi dan membuat kebencian rakyat terhadap ABRI terus meninggi. Ini berisiko ABRI harus ikut tenggelam bersama jatuhnya pemerintahan Soeharto. Pilihan lain meminta kerelaan Soeharto berhenti, dan itu hanya dapat dilakukan jika ABRI menjamin keselamatan keluarga Cendana pada era pasca-Soeharto.

ABRI tampaknya mengambil pilihan kedua. Soeharto menyatakan berhenti dan Panglima ABRI menyatakan jaminan perlindungan bagi mantan Presiden RI itu bersama keluarganya. Tentang bagaimana para petinggi ABRI yang saat itu terdiri dari sedikitnya dua faksi yang bersaing akhirnya mencapai kesepakatan, ini belum terungkap dengan jelas. Mudah-mudahan mereka akan terpicu untuk menuliskan pengalaman masing-masing seperti yang telah dilakukan Habibie, sehingga kita semua mendapatkan informasi yang lebih komplet dan transparan. ♦♦♦♦♦

REFERENSI

- Agung Rulianto dkk., "Mei 1998, Ketika Pucuk Republik Berganti", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 36-37
- Ali Imron Hamid, "Detik-Detik Pertemuan Prabowo-Habibie", *Harian Suara Merdeka*, 2 Oktober 2006
- Andari Karina Anom, "Bertarung Lewat 'Bahasa' Buku", majalah *Tempo*, 22 Oktober 2006: hlm. 90-91
- Arfi Bambani Amri, "Kivlan Zein: Misi Wiranto Jatuhkan Soeharto", *Detikcom*
- Arfi Bambani Amri, "Kivlan Zein: Habibie-Wiranto Main Mata Jatuhkan Soeharto", *Detikcom*
- Atmadji Sumarkidjo (2006). *Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- "B.J. Habibie: Simpan 30 Persen Catatan Harian", *Harian Suara Merdeka*, 1 Oktober 2006
- Baharudin Jusuf Habibie (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri
- "Belajar dari Buku Habibie", SKH *Tribun Batam*, 29 September 2006
- Budi Setyarso, "Dalam Kepungan Kawat Berduri", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 34
- Budi Setyarso dkk., "Kesaksian Para Jenderal", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 38-39
- "Buku Habibie: Mantan Perwira Muda Merasa Disingkirkan (ed. 1 s.d. 6)", *harian Lampung Post*, 5-10 Oktober 2006

- Erwin Y. Salim, "Habibie Mengungkap Misteri", majalah *Gatra* edisi 45, 21 September 2006 "Habibie Tolak Prabowo, Wiranto Pilih Bungkam", SKH *Tribun Batam*, 29 September 2006
- Hillarius U Gani, "Prabowo Akui Ada Pengerahan Pasukan di Jakarta", *Media Indonesia Online*, 28 September 2006
- Hendra Esmara dkk (2000). *Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*. Jakarta: Sinar Harapan
- James Luhulima (2001). *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Kompas
- John Howard, "US Intelligence Say Habibie 'Right Type of Person'" (<http://www.scoop.co.nz>)
- Julius Pour, "Kesaksian B.J. Habibie: Detik-Detik Menentukan pada Tahun 1998", *Harian Kompas*, 20 September 2006
- "Kejaksaan Buru Buku Habibie", *Harian Rakyat Merdeka*, 3 Oktober 2006
- Kivlan Zen (2004). *Konflik dan Integrasi TNI AD*. Jakarta: Institute for Policy Studies
- Maryadi, "Fadli Zon: Prabowo Bisa Ambil Alih Kekuasaan Tahun 1998", *Detikcom*
- "Prabowo Membantah Habibie", *Republika*, 29 September 2006
- "Prabowo Minta Habibie Revisi Buku", *Lampung Post*, 29 September 2006
- "Prabowo Subianto: Itu Tuduhan Kejam", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 32
- Salahuddin Wahid (2006). "Habibie, Prabowo, dan Wiranto". *Sumatera Express*, 30 September 2006
- Shanty Sibarani, "Dibyo Widodo Akui Tidak Ada Kudeta 1998", *Media Indonesia Online*
- Subagyo HS (2004). *KSAD dari Piyungan*
- Suwarjono, "Konflik Wiranto-Kivlan Adalah Dendam Politik Prabowo", *Detikcom*
- Wahyu Dhyatmika, "Langkah Kuda Wiranto", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 33

Wenseslaut Manggut dkk., "Bara dari Buku Habibie", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 27-30

Wiranto (2003). *Bersaksi di Tengah Badai*

"Wiranto: Tidak Ada Siasat-Siasatan", wawancara, majalah *Tempo*, 29 Oktober 2006: hlm. 20-22

Woro Swasti, "Kivlan Zein: Wiranto Bertanggung Jawab dalam Kerusuhan Mei", *Detikcom*

Yosep Suprayogi, "Siapa Mengamankan Siapa", majalah *Tempo*, 8 Oktober 2006: hlm. 35

<http://www.lampungpost.com>

<http://www.golkar.or.id>

<http://www.tribun-batam.com>

<http://www.harianterbit.com>

<http://www.detiknews.com>

<http://www.sumeks.co.id>

<http://www.republika.co.id>

<http://www.mediaindo.co.id>

<http://www.rakyatmerdeka.co.id>

<http://www.suaramerdeka.com>

<http://menkokesra.go.id>

<http://www.erasuslim.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.gatra.com>

<http://www.tempointeractive.com>

kontroversi "kudeta" PRABOWO

Presiden **Soeharto** sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.
Para jenderal meninggalkan Jakarta.
Mahasiswa demonstran ditembaki.
Kerusuhan meletus di Jakarta.
Gedung MPR/DPR diduduki demonstran.

Ternyata kerusuhan dan krisis politik terjadi di tengah konflik internal Angkatan Darat yang cukup meruncing. Benarkah ada rivalitas tajam antara **Jenderal Wiranto** dan **Letjen Prabowo**?

Benarkah rumor **Letjen Prabowo** mengerahkan pasukan untuk "mengepung" kediaman Presiden **Habibie** dan obyek-obyek vital pemerintahan? Adakah peran perwira-perwira tinggi grup **Benny Moerdani**? Benarkah **Soeharto** mengira **Habibie** dan **Letjen Prabowo** berniat menjatuhkan dirinya?



Penerbit Media Pressindo
Jl. Irian Jaya D-24 Perum Nogotirto Elok II
Yogyakarta 55292
Telp. (0274) 7103084 Faks. (0274) 620879

ISBN (13) 978-979-222-172-5

ISBN 979-222-172-7



Kontroversi "Kudeta" Prabowo